Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementasi Report Good Corporate Governance

2024

BPR DMG

PT. BPR Dana Multi Guna

Kantor Pusat
Jl. Ki Hajar Dewantara No.63,
Karangasih, Kec. Cikarang Utara,
Bekasi, Jawa Barat 17534, Indonesia

(021) 890 1415, 890 2691
(021) 8910 8168, 8911 5922

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION REPORT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR Dana Multi Guna
Tahun 2024

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Multi Guna selama tahun 2024

Kabupaten Bekasi, 30 Januari 2025

ttd	ttd
Muhamad Alwin Direktur Utama	Darheni Cahya Noviyanti Direktur

Menyetujui

ttd	ttd
Riwandari Juniasti Komisaris Utama	Bambang Widiyanto Komisaris

KATA PENGANTAR

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleknya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 TAHUN 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan maka dengan ini kami sampaikan Laporan penerapan tata kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna Tahun 2024.

Laporan ini meliputi aspek Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam upaya meningkatkan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Dana Multi Guna. Direksi telah berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank. Harapan kami pada periode berikutnya Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna dapat meningkat lebih baik daripada periode sebelumnya.

Kab. Bekasi, 30 Januari 2025

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA MULTI GUNA

ttd

Muhamad Alwin
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Tujuan Penerapan Tata Kelola 1
3. Referensi 2
4. Komitmen Penerapan Tata Kelola 2

BAB.II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 4
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 4
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi 4
b. Kriteria Anggota Direksi 4
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 5
d. Tindaklanjut Rekomendasi Dewan Komisaris 7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 8
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris 8
b. Kriteria Anggota Dewan Komisaris 9
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 9
d. Rekomendasi kepada Direksi 11
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 12
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite 12
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite 12
c. Program Kerja dan Realisasi program Kerja Komite 13
B. Kepemilikan Saham Direksi 13
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna 13
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 13
C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Direksi 14
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi 14
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi 14
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 14
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Dana Multi Guna 14
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 15
E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 15
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris 15

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 15
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 16
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris 16
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 16
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 16
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 16
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 17
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 17
I. Jumlah Penyimpangan Internal 17
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi 18
K.Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 18
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Politik 18

BAB III. KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA 19
1. Nilai Komposit 19
2. Hasil Penilaian Masing-masing Faktor 19
3. Kesimpulan Penerapan Tata Kelola 20
4. Struktur Organisasi 21

BAB IV. PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 12 /SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *(Good Corporate Governance)* yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleknya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi *(transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi *(independency*) dan kewajaran (*fairness*).

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna

PT. BPR. Dana Multi Guna menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR. Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk :

a. Mendukung visi PT. BPR. Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.
b. Mendukung Misi PT. BPR. Dana Multi Guna, yaitu :
    - Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.

- Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
- Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

3. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu pada :

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

4. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para

pemangku kepentingan terhadap PT. BPR. Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR. Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya secara sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR. Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Dana Multi Guna Akta Notaris Nomor 1 tanggal 14 Juli 2023, Perihal perubahan pengangkatan kembali Pengurus. Direksi PT. BPR Dana Multi Guna berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan komposisi sebagai berikut

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Muhamad Alwin Direktur Utama	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Bekasi
2	Darheni Cahya Noviyanti Direktur	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jakarta

b. Kriteria Anggota Direksi

Direksi telah memiliki kriteria / persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :

- Direktur berpendidikan S1, dan Direktur Utama berpendidikan S2.
- Seluruh Direksi berpengalaman di bidang Perbankan.
- Seluruh Direksi memiliki sertifikasi kompetensi Direktur yang masih berlaku
- Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah diangkat melalui RUPS.
- Seluruh Direksi bertempat tinggal dikota / kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi BPR Dana Multi Guna

I. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama PT BPR Dana Multi Guna

1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2) Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
3) Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5) Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan :
   a) Pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
   b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.
7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9) Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

10) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
11) Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
12) Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
13) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

II. Tugas dan tanggung jawab Direktur dan/ atau Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2) Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
3) Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5) Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan :
   - Pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
   - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.
7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9) Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
11) Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
12) Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
13) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

d. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :

1) Telah dilakukan atau mengikutsertakan karyawan dalam training / sosialisasi terkait tata kelola dan manajemen risiko.
2) Telah menyusun Rencana Bisnis setiap tahunnya dan Pelaksanaan Rencana Bisnis setiap semester.
3) Telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi, telah melakukan pemenuhan untuk jumlah Dewan Komisaris dan penunjukan pejabat eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko.
4) Melaksanakan sosialisasi rencana bisnis dan semua kebijakan di tahun 2022 kepada seluruh karyawan.
5) Mengambil langkah-langkah serius untuk penyelesaian kredit bermasalah.
6) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan terkait batas maksimum pemberian kredit BPR.

7) Membuat dan menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.
8) Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan telah dilaporkan ke OJK.
9) Telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk periode 31 Desember 2022.
10) Telah disusun SOP terkait manajemen risiko.
11) Menyampaikan Laporan Manajemen Risiko untuk periode Semester II tahun 2022.
12) Menyesuaikan/mengkinikan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.
13) Menindaklanjuti hasil temuan audit OJK.
14) Menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris agar Laporan Keuangan tahun 2024 diaudit oleh KAP Dra. Yati Ruhiyati.

2. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Dana Multi Guna Akta Notaris Nomor 1 tanggal 14 Juli 2023, Perihal perubahan pengangkatan kembali Pengurus. Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Utama dengan komposisi sebagai berikut

No	Nama Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Komisaris Utama	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jakarta
1	Bambang Widiyanto Komisaris	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jawa Barat

b. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, di antaranya :

- Komisaris berpendidikan S3, dan Komisaris Utama berpendidikan S2.
- Telah memiliki sertifikasi kompetensi di BPR yang masih berlaku.
- Telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).
- Bertempat tinggal di Jakarta / berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

c. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

I. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama PT.BPR Dana Multi Guna

1) Dewan Komisaris, wajib melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam tiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali:
   a) penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK,
   b) hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
7) Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 hari kerja sejak ditemukan:
   a) Pelanggaran peraturan perundangan,

b) Keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR. Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.

8) DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tsb dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
9) Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
10) DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
11) Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
12) Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR tiap semester.

II. Tugas Tanggung jawab Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna

1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam tiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasehat kepada Direksi.
4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali:
   a) penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK,

b) hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
7) Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan:
   a) Pelanggaran peraturan perundangan,
   b) Keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR. Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
8) DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
9) Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
10) DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
11) Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
12) Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR tiap semester.

d. Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Antara lain :

1) Peningkatan Performance Kredit yang diberikan disarankan agar melakukan ekspansi kredit secara lebih agresif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, melakukan diversifikasi produk kredit dengan memperhatikan kebutuhan pasar, melakukan monitoring kredit dengan lebih ketat.

2) Meningkatkan penghimpunan dana murah.
3) Dilakukan penagihan yang lebih intensif dan kontrol yang ketat terhadap kredit bermasalah dan WO.
4) Agar dilakukan pemantauan atau penagihan kredit yang direstruktur agar kualitas kredit tidak turun ke KL dan melakukan stress test terkait permodalan dan likuiditas BPR dari dampak Restrukturisasi Covid-19.

3. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada

b. Struktur, Keanggotaan Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite			Pihak Independent (ya/ tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
2	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
3	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja & Realisasi Program Kerja Komite *)	
1	**Komite Audit**	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0
2	**Komite Pemantau Risiko**	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0
3	**Komite Remunerasi & Nominasi**	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna per Desember 2024

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR Dana Multi Guna	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Muhamad Alwin **Direktur Utama**	Nihil	Nihil
Darheni Cahya Noviyanti **Direktur**	1.240.000.000	20%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Muhamad Alwin **Direktur Utama**	nihil	nihil
Darheni Cahya Noviyanti **Direktur**	nihil	nihil

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Muhamad Alwin		√		√		√
Darheni Cahya Noviyanti		√	√		√	

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Muhamad Alwin		√		√		√
Darheni Cahya Noviyanti		√	√		√	

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Dana Multi Guna per Desember 2024

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR Dana Multi Guna	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Riwandari Juniasti **Komisaris Utama**	4.185.000.000	67,50%
Bambang Widiyanto **Komisaris**	Nihil	Nihil

2. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Riwandari Juniasti **Komisaris Utama**	nihil	nihil
Bambang Widiyanto **Komisaris**	nihil	nihil

E. **Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.**

1. **Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Riwandari Juniasti		√	√		√	
Bambang Widiyanto		√		√		√

2. **Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Riwandari Juniasti		√	√		√	
Bambang Widiyanto		√		√		√

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama Tahun 2024

Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Nominal (Jutaan Rp)	Orang	Nominal (Jutaan Rp)
Gaji	2	249	2	387
Tunjangan	2	283		
Tantiem				
Kompensasi Berbasis Saham				
Remunerasi Lainnya				
Total		**532**		**387**

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama Tahun 2024

Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas	
	Direksi	Dewan Komisaris
Perumahan	-	-
Transportasi	Kendaraan Mobil	-
Asuransi Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi Inhealth, Prudential, BNI Life	BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi Inhealth
Fasilitas Lainnya	-	-

G. Rasio Gaji tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Tahun 2024 dalam skala perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1	
	(a/b)	1
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan pegawai yang terendah (b)	2.79	1
Rasio Gaji Anggota Direksi yng tertinggi (a) dan Anggota Direksi yang terendah (b)	1.56	1
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.05	1
Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi (a) dan Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.73	1
Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi (a) dan Pegawai yang tertinggi (b)	3.5	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR Dana Multi Guna telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat(*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat sebanyak 5 (lima) kali dal 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22 Februari 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Desember 2023 dan 31 Januari 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Persiapan RUPS 2024, Isu Strategis : Pertumbuhan KYD dan NPL, Hasil Sress Testing Aspek Permodalan dan Likuiditas, TKS Berbasis Risiko
2	30 Mei 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 30 April 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Evaluasi RBB 2024 dan Rencana Revisi RBB 2024, Isu Strategis Pertumbuhan KYD dan NPL, Progres Penjualan Agunan Kredit bermasalah, TKS Berbasis Risiko
3	15 Agustus 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 31 Juli 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Isu Strategis : Evaluasi Penyaluran Kredit, Evaluasi Kredit Bermaalah, TKS Berbasis Risiko
4	2 Oktober 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 30 September 2024, Penunjukan AP-KAP untuk audit tahun buku 2024
5	5 Desember 2024	2	Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Dana Multi Guna 31 Desember 2023 s/d 30 November 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Pembahasan RBB 2025, Isu Strategis : Hasil simulasi CKPN dan Aspek Permodalan, Tindak Lanjut Audit temuan OJK dan Audit Internal, TKS BPR, Integritas Pelaporan Keuangan Bank

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	(dalam %)
1	Riwandari Juniasti	5	-	100
2	Bambang Widiyanto	5	-	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan intern (internal fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan / atau outsourcing).

Sepanjang tahun 2024, BPR Dana Multi Guna tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini

Jumlah Penyimpangn Internal dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakiukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawat Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindklanjuti Melalui Prose Hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permasalahan Hukum yang dihadapi BPR Dana Multi Guna.

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Riwandari Juniasti	Komisaris Utama	Muhamad Alwin	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	792	Gedung kantor Pusat DMG Jl. KH Dewantara No.63

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1) Selama tahun tahun 2024, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya pemberian kepada lingkungan kemasyarakatan/ lingkungan sekitar BPR Dana Multi Guna.
2) Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

BAB III
KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *Self Assesment* penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance / GCG*) terhadap 12 (dua bekas) faktor penilaian, maka hasil penilaian per Desember 2024 sebagai berikut :

1 Nilai Komposit GCG secara komposit sebesar **1** dengan predikat **1.**

2 Hasil Penilaian masing-masing Faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5
1	**Aspek Pemegang Saham**	**1**
2	**Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**	**1**
3	**Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris**	**1**
4	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**	**0**
5	**Penanganan Benturan Kepentingan**	**2**
6	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**	**2**
7	**Penerapan Fungsi Audit Intern**	**2**
8	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**	**1**
9	**Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud**	**1**
10	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**	**1**
11	**Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**	**1**
12	**Rencana Bisnis**	**2**
	Nilai Komposit : 1.25 **Predikat Komposit : Peringkat 1**	

3 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna sesuai hasil *Self Assesment*, adalah :

a) Pengurus PT. BPR. Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengusus BPR Dana Multi Guna.

b) PT. BPR. Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

c) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

4 Struktur Organisasi PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI
P.T. BPR. DANA MULTI GUNA
DESEMBER 2024

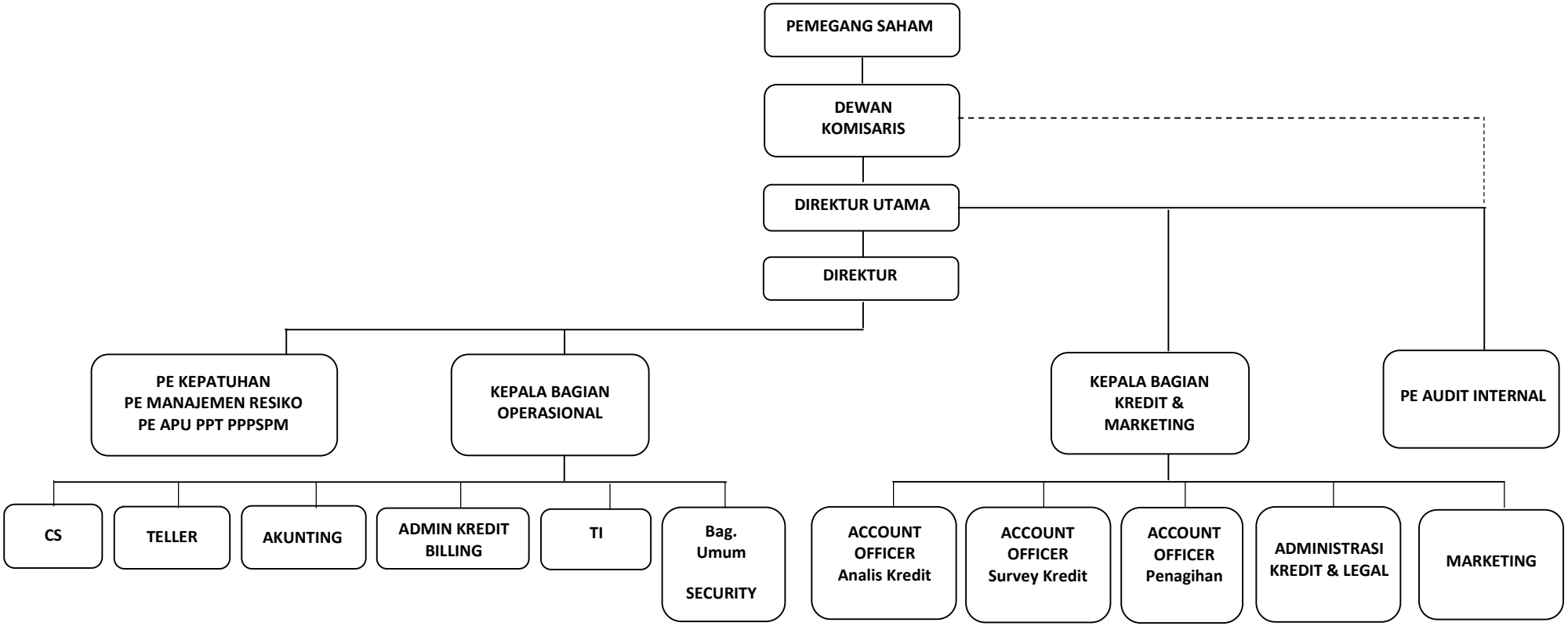

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)PT.BPR Dana Multi Guna ini disampaikan, sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Dana Multi Guna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT.BPR Dana Multi Guna.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh karyawan/i BPR Dana Multi Guna kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi gerak langkah dan usaha kita, Amin.

_____

BPR DMG

Passion
Love
Ultimate
Secure

2024 ANNUAL REPORT

Jl. K.H. Dewantara No.63
Cikarang Utara - Bekasi
17534

PT. BPR Dana Multi Guna, Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan Bank Peserta Penjaminan LPS

TABLE OF CONTENTS

I. PENDAHULUAN

Kata Pengantar
Visi dan Misi
Ikhtisar Data Perusahaan
Ikhtisar Data Kantor

II. INFORMASI UMUM

A.1. Susunan Kepengurusan
A.2. Komposisi Kepemilikan Saham
A.3. Perkembangan Usaha
a. Ikhtisar Data Perizinan
b. Ikhtisar Data Keuangan
c. Rasio Keuangan
d. Penjelasan dan Penyebab utama NPL
A.4. Strategi dan Kebijakan Manajemen
A.5. Laporan Manajemen
a. Struktur Organisasi
b. Bidang Usaha sesuai anggaran dasar
c. Teknologi informasi dan Sistem keamanan
d. Perkembangan dan Target pasar
e. Jumlah dan jenis Lokasi Kantor
f. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga lain
g. Kepemilikan
h. Keterkaitan
i. Sumber daya manusia
j. Kebijakan dan Pemberian gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi pengurus
k. Perusahaan penting
l. Aktivitas perusahaan
m. Prinsip Tata Kelola Perusahaan
A.6. Pelaksanaan Edukasi dan Literasi
A.7. Pendidikan dan Pelatihan
a. Kegiatan Literasi dan Inklusi

TABLE OF CONTENTS

III. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Neraca Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
Laporan Komitmen dan Kontijensi Publikasi
Laporan Informasi lain
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas

IV. OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN HASIL PEMIRAKSAAN KAP, IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

V. MANAJEMEN LETTER

VI. PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Kata Pengantar

Laporan tahunan PT. BPR Dana Multi Guna merupakan laporan pertanggung jawaban pengurus atau pengelolaan PT. BPR Dana Multi Guna yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tutup Buku Tahun 2024.

Laporan tahunan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Multi Guna mengenai tanggung jawab Direksi untuk menyusun Laporan Tahunan untuk dapat diperika oleh para pemegang saham.

Laporan tahunan ini merupakan dokumen yang bersifat strategis yang dapat menjadi sumber informasi bagi setiap stakeholder dalam PT. BPR Dana Multi Guna di tahun 2024.

Kami menyadari bahwa pencapaian di tahun 2024 tidak akan pernah terjadi tanpa dukungan dari nasabah, karyawan dan jajaran manajemen serta pemangku kepentingan lainnya, terutama dimasa pandemi Covid19 yang terjai sejak Maret 2020 yang berdampak besar pada perekonomian diseluruh dunia. Untuk itu jajaran Direksi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah dan terus mendukung upaya bersama dalam menggapai visi dan misi Bank.

Semoga laporan tahunan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Cikarang, 24 April 2025
PT. BPR Dana Multi Guna

Direksi

Muhamad Alwin	**Darheni Cahya Noviyanti**
Direktur Utama	*Direktur*

Visi dan Misi
PT. BPR Dana Multi Guna

Visi

Menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat

Misi

Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.

Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.

Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Cara Pencapaian

- Memahami kebutuhan individual nasabah, memberi kepuasaan pada nasabah dan memberikan rasa aman dan percaya kepada para nasabah yang mempercayakan dana dan jaminannya di BPR.

- Jasa keuangan kami harus dapat dipercaya dan memperkaya kehidupan banyak orang serta meningkatkan kesejahteraan kelaurga.

- Menjalin hubungan baik dengan nasabah untuk jangka panjang.

- Karyawan adalah sumber daya perusahaan yang paling berharga. Mereka harus mempunyairasa aman dalam pekerjaan, kondisi tempat kerja yang bersih, teratur, aman, dan memberikan pemenuhan sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga mereka, serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar.

- Berkomitmen pada standar etika dan integritas tinggi adalah merupakan keharusan karena kami bertanggung jawab kepada nasabah kami, karyawan kami, pemegang saham, perhimpunan BPR, lingkungan yang kami diami, pemerintah dan kepada masyarakat yang kami layani.

- Menjalankan Prinsip Kerja : Mutu dalam semua pekerjaan : selalu belajar, berpikir, menganalisa, mengevaluasi dan meningkatkan. Jasa yang bisa diandalkan : Tepat waktu dengan keunggulan dan konsisten. Komukasi yang baik : Mendengarkan, bertanya, berbicara dan menyamakan persepsi mulai dari manajemen puncak hingga seluruh karyawan.

Cara Pencapaian dengan DMG

PASSION

Seseorang yang memiliki passion akan terus menerus memikirkan, bulit-in dalam dirinya, untuk mewujudkan sesuatu, dan ia tidak pernah akan berhenti sebelum sesuatu itu.

LOVE

Seseorang yang penuh cinta akan mengerjakan tanpa keterpaksaan dan tak akan menghalalkan segala cara.

ULTIMATE

Mengeluarkan semua yang terbaik dalam dirinya

SECURE

Pribadi yang aman, tahu siapa dirinya, apa kekuatannya, apa perannya, sehingga tidak bersaing secara tidak sehat dengan orang lain tetapi bersinergi.

Nilai-nilai yang membimbing kami

Menyadari pelanggaran etika berdampak seketika.

Ketaatan terhadap suara nurani.

Memiliki standar yang tinggi.

Kejujuran yang penuh

Keuntungan yang wajar.

Cara untuk tumbuh & berperan serta

- Berpikirlah positif dan cerdas dalam bekerja. Rasa hormat, tanggung jawab dan integritas membuat banyak hal baik terjadi.
- Pahamilah bahwa senantiasa belajar dapat mempercepat perubahan. Tim yang baik adalah batu pijakan untuk menjalankan usaha kita.
- Politik kantor banyak membuang energi dalam memecah belah, bukan mempersatukan. Yang terpenting adalah bekerja dan bukan banyak bicara.
- Lingkungan BPR harus bersih, sehat dan nyaman bagi setiap orang. Jagalah agar tempat kerja Anda selalu teratur, bersih dan rapih. Merupakan tugas Anda untuk merapikan setelah bekerja.
- Kita semua akan berbagi dalam keberhasilan yang kita ciptakan.
- Cintailah pekerjaan Anda. Besar atau kecil tugas tersebut, selesaikanlah dengan baik. Pikirkan setiap tindakan dalam pengertian bagaimana hal itu dapat memperkuat BPR.
- Belajarlah untuk mengemukakan pendapat, keluhan dan saran.
- Seimbangkanlah kehidupan keluarga dengan BPR, sehingga tercipta hubungan yang sehat.
- Belajarlah sebanyak mungkin tentang pekerjaan Anda, perusahaan, dan sekeliling Anda, sehingga Anda bisa tumbuh bersama dengan BPR.
- Milikilah kebahagiaan agar kegembiraan mengantar kita sepanjang hari.

Tumbuh untuk *Melayani*

Melayani untuk *Tumbuh*

IKHTISAR DATA PERUSAHAAN

Nama	PT. BPR Dana Multi Guna
NPWP	01.713.436.2-414.000
Tanggal Berdirinya	15 Mei 1996
Modal Dasar	Rp. 10.000.000.000,00
Modal Disetor	Rp. 6.200.000.000,00
Nilai Nominal Saham	Rp. 1.000.000,00
Jumlah Saham	6.200 lembar
Alamat	Jl. KH. Dewantara No. 63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17534
Telepon	0218901415, 8902691, 89108168
Faksimili	02189115922, 021 8901415 ext. 14
Email	customer-service@bprdmg.com
Website	www.bprdmg.com

IKHTISAR DATA KANTOR

Kantor Pusat

Tanggal Operasional	15 Mei 1996
Lokasi dan Alamat	Jl. KH. Dewantara No. 63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17534
Telepon dan Fax	(021) 8901415, Fax (021) 89115922
Pimpinan	Muhamad Alwin
Jumlah Karyawan	22 Orang

A.1. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Sesuai dengan Akta Notaris No. 3, tanggal 30 Ju li 2018. Dihadapan
Notaris Harinanto Sugiono, SH,
Susunan pengurus PT. BPR. Dana Multi Guna adalah sebagai berikut :

Riwandari Juniasti
Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta 02 Juni 1967, menyelesaikan pendidikan sarjana di fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Dunia Usaha Program akuntansi, IKIP Jakarta tahun 1991, dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gunadarma. Memulai karirnya di PT. BPR DanaMulti Guna tahun 1996 dari mempersiapkan pendirian sampai beroperasinya PT. BPR Dana Multi Guna, diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2002 sampai 2018, kemudian menjabat sebagai komisaris Utama pada 01 Agustus 2018 hingga sekarang, dan telah lulus sertifikasi Profesi Direktur BPR tahun 2005, telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan Desember 2011, dan terakhir dibulan April 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir pada tanggal 19 Mei 2026.

Bambang Widiyanto
Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada 29 Juli 1956, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1986, telah menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Haluoleo Kendari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun 1997, menyelesaikan Program Magister Manajemen di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2001, dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2011. Menjabat sebagai Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna sejak Mei 2019 hingga sekarang. Telah lulus Sertifikasi kompetensi Direktur tahun 2016 dan sertifikasi kompetensi Komisaris tahun 2020. Sertifikat Kompetensi Direktur berakhir tanggal 19 September 2021 dan Sertifikat Kompetensi Komisaris berakhir tanggal 13 Juni 2026.

Muhamad Alwin
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 09 Agustus 1972, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan S2 ditahun 2014. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 1999 dibagian Administrasi, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Kredit dan Marketing, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2002 sampai Juli 2018, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada 01 Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR pada tahun 2007. Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direktur dibulan April 2013 dan terakhir dibulan Juli 2018 Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 18 September 2026.

Nn Darheni Cahya Noviyanti
Direktur

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta 06 November 1974, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Triaskti, Jakarta. Memulai karir di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2011 dibagian Marketing, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas, pada tahun 2013 diangkat menjadi sebagai Komisaris sampai Juli 2018, telah lulus Sertifikasi Direksi tahun 2010 dan lulus fit and proper test dibulan Desember 2012, telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan September 2020. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 08 November 2025.

Edwin Yunarinda
Pejabat Eksekutif

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta 17 Mei 1973, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Pancasila pada tahun 1998, memulai karirnya pada beberapa perusahaan antara lain:
- 1999-2002 di PT. Truno Tawang Agung sebagai Staf Pembukuan.
- 2002-2006 di Allman Consultan Management sebagai Web Content Asisten Manager.
- Mengawali karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2007 dibagian EDP, kemudian diangkat menjadi kepala Kantor Kas dan pejabat Eksekutif pada tahun 2013. Dan telah lulus Sertifikasi Direksi tahun 2013. Terakhir mengikuti penyegaran Sertifikasi profesi Direksi dibulan November 2015. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 24 November 2026.

Rifi Safitri
Pejabat Eksekutif

Warga negara Indonesia, lahir di Bekasi 16 Februari 1997, menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) pada tahun 2019, memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 21 Februari 2020 sebagai Teller. Kemudian di tahun 2021 sebagai Akunting. Di tahun 2022 sebagai menjabat Audit Internal. Sertifikat Kompetensi Audit internal berakhir bulan September 2027.

Warga negara Indonesia, lahir di Solo 08 Januari 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PBM Tahun 2018. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 2002 sebagai Head Teller, kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Operasional tahun 2023.

Caecilia Wiwik Suprihatiningsih
Kepala Bagian Operasional

Warga negara Indonesia, lahir di Bekasi 28 Februari 1993, menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Informatika (S1) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MIC Cikarang Tahun 2015. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 2016 sebagai Teller, kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Kredit tahun 2023.

Muhammad Leriana
Kepala Bagian Kredit

A.2. KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Dalam Rupiah

Nama Pemegang Saham	Nominal Kepemilikan	%
Riwandari Juniasti, Spd. MM	4.185.000.00	67.50
Darheni Cahya Noviyanti	1.240.000.00	20.00
Drs.H.Soenarko	775.000.00	12.50
	6.200.000.00	100.00

A.3. PERKEMBANGAN USAHA

a. Ikhtisar Data Perizinan

- Ijin Prinsip Departemen Keuangan RI No. S-1713/MK.17/1994, tanggal 02 Desember 1994
- Akta Pendirian No. 50 tanggal 24 Desember 1994 dihadapan Notaris Anis Husin Abdat,SH.
- Persetujuan Prinsip pendirian BPR dari Bank Indonesia No. 27/1946/UBPR/AdR tanggal 24 Maret 1995
- Keputusan Mentri Kehakiman RI, tentang Akta Pendirian PT. BPR. Dana Multi Guna No.C2-163.HT.01.01.Th.95. tanggal 5 Januari 1995.
- Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 2 Agustus 1995 dihadapan Notaris Anis Husin Abdat,SH.
- Berita Acara Rapat No.47, 22 Desember 1995 dihadapan Notaris Anis Husin Abdat SH.
- Izin Usaha dari Departemen Keuangan RI No. Kep-106/KM.17/1996, tanggal 27 Maret 1996.
- Keputusan Mentri Kehakiman RI No. C2 4204.HT.01.04.Th. 96, tentang Persetujuan Perubahan Pasal 1 dan Pasal 3 AD ART PT.BPR. Dana Multi Guna tanggal 6 Maret 1996.
- Pernyataan Keputusan Rapat No. 49, 12 D esember 1996 dihadapan Notaris Refizal, SH.
- Berita Acara Rapat No. 50, tanggal 12 Desember 1996 dihadapan Notaris Refizal, SH.
- Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 25 Januari 1997 dihadapan Notaris Refizal,SH.
- Akta Perubahan No. 88 Tanggal 5 Agus tus 1997 dihadapan Notaris Refizal, SH
- KepMen Kehakiman RI No. C2 11744.HT.01.04.Th. 98 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Persetujuan Pasal 2 dan 3.
- Pernyataan Keputusan rapat No. 2 tanggal 31 Oktober 2002 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono, SH.
- KepMen Keh akiman dan Ham No. C 09110.HT.01.04.Th. 2003 tanggal 25 April 2003 tentang perubahan Anggaran Dasar.
- Berita Negara RI No. 60 tanggal 29 Juli 2003
- SITU No. 503/KEP/08/DPDLP/2003 tanggal 24 Februari 2003;
- Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 24 November 2006 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono.
- Berita Acara Rapat No. 5 tanggal 24 November 2006 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 5 Juli 2008 No. 3 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.
- SITU No. HER.503.1/32/DPDLP/UPPT/08, tanggal 20 Juni 2008;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 Juli 2010 No. 11 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15 Januari 2013 No. 8 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.

A.3. PERKEMBANGAN USAHA

a. Ikhtisar Data Perizinan

- Tanda Daftar Perusahaan No. 100716402183 tanggal 21 Juli 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
- NPWP No. 01.713.436.2 414.000
- Surat Keterangan Domisili Usaha No.503/ 287 DU/VI/201 8 /EKBANG
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 30 Juli 2018 No.3 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 15 Mei 2019 No.1 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 23 Desember 2019 No.7 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono SH.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 Tanggal 19 Juli 2022 dihadapan Notaris Harianto Sugiono, SH.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 Tanggal 14 Juli 2023 dihadapan Notaris Harianto Sugiono, SH.
- Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 3 tanggal 24 April 2024 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono, SH.
- Keputusan Mentri Kehakiman RI No.AHU-0030024.AH.01.02 TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan AD ART PT.BPR.Dana Multi Guna tanggal 22 Mei 2024
- NIB (Nomor Induk Berusaha). 9120107700048

A.3. PERKEMBANGAN USAHA

b. Ikhtisar data keuangan

Jenis Rasio dan Indikator Keuangan	Realisasi		Mutasi	Keterangan
	Dec-24	Dec-23		
Rasio Keuangan				
Capital Adecuacy Ratio (CAR)	51.52	49.81	1.71	Membaik
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	17.34	12.92	4.42	Menurun
Non Performing Loan (NPL)	26.09	18.61	7.48	Menurun
Rentabilitas				
Return On Asset (ROA)	1.17	1.95	-0.78	Menurun
Rasio BOPO	93.45	89.98	3.47	Menurun
Likuiditas				
Cash Ratio (CR)	11.97	12.21	-0.24	Menurun
Loan to Deposit Ratio (LDR)	112.63	119.42	-6.79	Menurun
Indikator Keuangan				
Total aset	30,515,278,905	30,742,037,099	-226,758,194	Menurun
Penempatan pada Bank Lain	8,670,351,291	7,770,668,063	899,683,228	Meningkat
Kredit yang diberikan	21,300,354,798	22,854,713,210	-1,554,358,412	Menurun
Dana Pihak Ketiga	18,911,553,432	19,138,017,519	-226,464,087	Menurun
- Tabungan	3,151,490,083	3,161,968,531	-10,478,448	Menurun
- Deposito	15,760,063,349	15,976,048,988	-215,985,639	Menurun
Simpanan dari Bank lain	3,800,000,000	4,050,000,000	-250,000,000	Menurun
Pinjaman diterima	-	-	-	
Laba tahun berjalan setelah pjk	315,236,875	506,367,043	-191,130,168	Menurun

A.3. PERKEMBANGAN USAHA

c. Rasio keuangan

Berikut Rasio Keuangan PT. BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2024

KPMM	51,52%
NPL bruto	26,09%
NPL netto	22,56%
ROA	1,17%
BOPO	93,45%
CR	11,96%
LDR	77,33%

A.3. PERKEMBANGAN USAHA

d. Penjelasan dan Penyebab NPL, serta langkah penyelesaian

- Penjelasan dan Penyebab Utama NPL, Yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan bayar nasabah yang menurun akibat tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama segmen mikro dan kecil yang menjadi mayoritas klien BPR.Debitur dengan kualitas Macet dengan jumlah baki debet diatas Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah), sudah pernah dilelang dan akan proses lelang kembali atau dipasarkan.
2. Pemutusan kontrak kerja sama dengan perusahaan sebagai salah satu faktor eksternal yang berdampak langsung pada usaha debitur sehingga menyebabkan gagal bayar kredit.
3. Manajemen usaha nasabah kurang optimal, sehingga usaha tidak berjalan lancar dan berujung pada ketidakmampuan membayar kredit.
4. Kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, misalnya daya beli menurun dan kemampuan membayar debitur turut mempengaruhi, serta ketidakpastian pasar lokal maupun nasional.
5. Dampak dari kondisi makroekonomi ini sangat mempengaruhi sektor UMKM sebagai basis utama debitur BPR.

- Langkah Penyelesaian NPL, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan Kredit, serta melakukan analisa yang cermat dan melaksanakan pengikatan yang sesuai hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan penagihan secara lebih intensif.
3. Pemberian kredit diprioritaskan pada kredit dalam jumlah dibawah Rp 100,000,000 untuk mengurangi risiko kredit dengan jumlah yang besar.
4. Memprioritaskan pemberian Kredit untuk Modal Kerja.
5. Agunan yang diterima saat ini adalah tanah berikut bangunannya (SHM dan SHGB) dan memperkecil jumlah Kredit Agunan kendaraan bermotor yang memiliki risiko lebih tinggi.
6. Beberapa nasabah yang meminta LSM dalam penyelesaian kreditnya juga membuat penyelesaian Kredit menjadi berlarut-larut dan memerlukan penanganan khusus.
7. Mengoptimalkan kerjasama dengan pengacara untuk penagihan kredit bermasalah.
8. Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mempunyai kemauan bayar tetapi mengalami penurunan usaha dan kemampuan bayar.
9. Melakukan eksekusi kredit macet melalui KPKNL.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pengembangan/ perluasaan jaringan kantor, akan tetapi Bank telah menutup kegiatan operasional Kantor Kas per 1 Mei 2023, hal ini dilakukan karena mempertimbangkan efisiensi perusahaan.

A.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Strategi dan kebijakan Manajemen yang diambil dalam kegiatan operasional PT. BPR Dana Multi Guna adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk dan jasa terus menerus dilakukan untuk dapat mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah dan menghadapi makin ketatnya persaingan sektor mikro
   - Dibidang perkreditan dilakukan penyempurnaan ketentuan dan persyaratan pemberian kredit agar lebih kompetitif, baik dari segi bunga, proses maupun pelayanannya, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Selain itu juga dibutuhkan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperluas wilayah penyaluran kredit dengan penambah tenaga marketing.
   - Dibidang produk simpanan, baik Tabungan dan Deposito perlu makin dipikirkan bagaimana Simpanan BPR tetap merupakan pilihan masyarakat dalam menyimpan dananya. Selain menyakinkan masyarakat bahwa menyimpan dana di BPR baik dalam bentuk Tabungan ataupun Deposito aman dan dijamin oleh LPS, juga tetap mengupayakan pelayanan yang terbaik dan fleksibel namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat BPR belum bisa bersaing dengan Bank Umum dalam memberikan pelayanan dengan ATM, Mobile Banking, maupun Internet Banking.
   - Branding BPR dengan memperkenalkan BPR melalui sosial media dan melalui komunitas UMKM.
   - Mengembangkan produk baru dan program-program berhadiah untuk mempertahankan kesetiaan masyarakat yang memanfaatkan payment point BPR yang merupakan sumber fee based income di BPR.
2. Teknologi Sistem Informasi BPR yang ada saat ini dioptimalkan pemanfaatannya dan terus menerus dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah agar lebih cepat dan akurat, dan dapat disampaikan tepat waktu. Diharapkan kedepannya IT System ini dapat meningkatkan jumlah nasabah, baik nasabah Simpanan maupun Kredit. Bagi manajemen sendiri, IT System akan sangat membantu dalam memberikan informasi yang akura dan tepat waktu, sehingga segala risiko baik itu kredit, operasional, likuiditas maupun risiko lainnya yang mungkin timbul dapat segera diantisipasi dengan cepat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan ujung tombak dalam kegiatan operasional BPR terus menerus dilakukan. Pelatihan-pelatihan baik dilakukan di internal maupun dengan menyertakan pada lembaga pelatihan lainnya terus menerus dilakukan. Mutu pelayanan kepada nasabah dan memberikan pemahaman mengenaik dampak dari pelanggaran etika bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri, selalu menjadi bagian penting dalam setiap pelatihan yang diberikan kepada karyawan.

A.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Strategi dan kebijakan Manajemen yang diambil dalam kegiatan operasional PT. BPR Dana Multi Guna adalah sebagai berikut :

4. Fungsi pengawasan terus menerus ditingkatkan. Peran Audit Internal makin menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan operasional BPR. Pemberian pelatihan-pelatihan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga audit internal yang telah ditunjuk. Pengkinian Sistem dan Prosedur serta kebijakan dan Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan manajemen terus menerus dilakukan.
5. Tinggi NPL BPR merupakan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan. Strategi yang dilakukan adalah mengurangi kredit sindikasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan kredit sindikasi, dengan melakukan analisa yang cermat dan pengikatan yang sesuai hukum yang berlaku sehingga memudahkan proses eksekusi. Pemberian kredit diprioritaskan pada kredit dalam jumlah dibawah Rp 100,000,000,- dengan memberikan insetif berupa pengurangan/ pembebasan biaya provisi dan administrasi untuk kredit mikro. Memprioritaskan pemberian kredit untuk modal kerja. Agunan yang diterima untuk ini adalah tanah berikut bangunannya dan memperkecil jumlah kredit agunan kendaraan bermotor, mengingat banyaknya kredit dengan kendaraan bermotor sulit untuk dilakukan penarikan kendaraannya pada saat kredit tersebut bermasalah, dari persoalan pengikatan fiducia yang terlalu mahal dan juga karena sikap kurang baik dari nasabah yang dengan sengaja menghilangkan/ menyembunyikan ataupun sengaja mengurani nilai dari kendaraan tersebut, yang jika dipersoalkan biayanya melebihi dari sisa kredit. Beberapa nasabah yang meminta LSM dalam penyelesaian kreditnya juga membuat penyelesaian kredit menjadi berlarut-larut dan memerlukan penanganan khusus.
6. Permodal senantiasa selalu dijaga agar selalu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau rasio permodalan/ CAR BPR diatas ketentuan minimum, serta modal yang semakin terpenuhi harus menumbuhkan kegiatan usaha BPR.
7. Manajemen senantiasa mengindentifikasi risiko yang akan terjadi dan melakukan pengedalian risiko dengan meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dalam operasional BPR. Komisaris makin ditingkatkan perannya.

STRUKTUR ORGANISASI
P.T. BPR. DANA MULTI GUNA

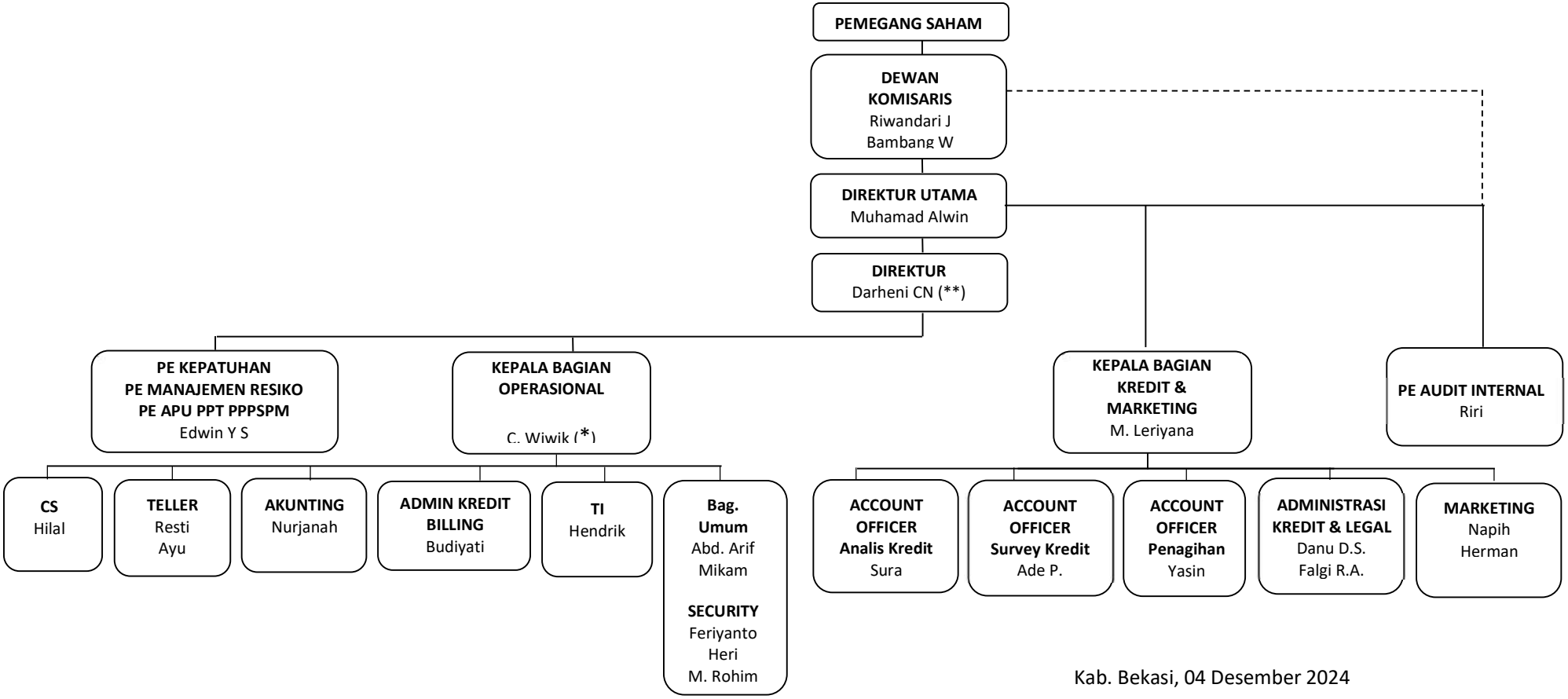

Kab. Bekasi, 04 Desember 2024

Direktur Utama	Direktur
Muhamad Alwin	Darheni Cahya Noviyanti

*Merangkap Pengaduan Nasabah

**Direktur membawahkan Fungsi Kepatuhan

—— Garis Komando ····· Garis Koordinasi

A.5. LAPORAN MANAJEMEN

b. Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Sesuai pasal 3 dalam akta Notaris No.8 tanggal 15 Januari 2013, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam Bank Perkreditan Rakyat, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut (a) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (b) Memberikan kredit (c) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan atau tabungan pada Bank lain.

c. Teknologi Informasi dan Sistem Keamanan

Sistem Keamanan Gedung baik di kantor pusat PT. BPR Dana Multi Guna, manajemen bekerjasama Dengan G4S Securicor.
Teknologi Informasi BPR menggunakan System Core Banking dengan nama ASSIST (PT. Assist Software Indonesia Pratama).

d. Perkembangan dan Target Pasar

Targer Pasar PT. BPR Dana Multi Guna tetap ada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). .

e. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

PT. BPR Dana Multi Guna memiliki 1 (satu) Kantor Pusat yang berlokasi di Jl. Ki Hajar Dewantara No.63 Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17534.

f. Kerjasama BPR dengan Bank Lain atau Lembaga Lainnya.

Saat ini PT. BPR Dana Multi Guna berkerjasama dalam hal payment point dengan PT. Tektaya.

g. Kepemilikan

Dalam Rupiah

Nama Pemegang Saham	Nominal Kepemilikan	%
Riwandari Juniasti, Spd. MM	4.185.000.00	67.50
Darheni Cahya Noviyanti	1.240.000.00	20.00
Drs.H.Soenarko	775.000.00	12.50
	6.200.000.00	100.00

h. Keterkaitan

Terdapat ketertarikan antara pemegang Saham Pengendali dan Pengurus BPR. Dalam hal ini Komisaris Utama PT. BPR Dana Multi Guna juga merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR. Antar pengurus masih ada keterkaitan keluarga namun tidak semenda, kecuali Direktur Utama yaitu Muhamad Alwin berasal dari Pihak tidak terkait dan Komisaris yaitu Bambang Widiyanto yang juga berasal dari Pihak tidak terkait.

Terdapat keterkaitan antara pemegang saham pengendali dan pengurus BPR. Dalam hal ini Komisaris Utama PT. BPR Dana Multi Guna juga merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR. Antar pengurus masih ada keterkaitan keluarga namun tidak semenda, kecuali Direktur Utama dan Komisaris berasal dari profesional.

i. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jabatan	Jumlah
Komisaris Utama	1
Komisaris	1
Direktur Utama	1
Direktur	1
Kabag Kredt	1
Kabag Operasional	1
Marketing	2
Account Officer	3
Admin Kredit	2
Administrasi Billing	1
Acounting	1
Customer Service	1
Teller	2
Umum	2
IT	1
Security	3
P.E Audit Internal	1
P.E APU PPT, Manrisk dan Kepatuhan	1
	26

Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Doktoral (S3)	1
Pasca Sarjana (S2)	2
Sarjana (S1)	8
Diploma 3 (D3)	3
SLTA	11
Lainnya	1
Jumlah	***26***

j. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Pengurus

BPR telah memiliki kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk karyawan, yang keputusannya dibuatkan dalam bentuk SK Direksi. Kebijakan pemberian gaji dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksa- naannya selama ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS.

k. Perubahan Penting

Selama dari tahun 2018 tidak terjadi perubahan penting yang mempengaruhi kegiatan Operasional.

l. Aktifitas Perusahaan

PT. BPR Dana Multi Guna bergerak dibidang perbankan yang berfungsi segabai alat intermediasi keuangan. Produk utama kami adalah Simpanan dalam bentuk Tabungan dan Deposito, serta memberikan layanan Pinjaman kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan karyawan. Produk dan jasa kami adalah :

1) Produk Simpanan
   a) Tabungan
      Tabungan Kesuma, Kesuma Usaha, Kesuma Hati, Kesuma Pelajar, Tabungan Antar Bank.
   b) Deposito
      Deposito Kesuma dan Deposito Antar Bank
2) Produk Pinjaman
   a) Kredit Fleksi
   b) Kredit Ceria
   c) Kredit Pegawai
3) Jasa Pelayanan Pembayaran
   PT. Tektaya

m. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan tata kelola perusahaan PT. BPR Dana Multi Guna berpedoman pada lima prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dimana kelima prinsip tersebut senantiasa diterapkan dalam kegiatan bisnis dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna telah sesuai dengan surat edaran dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi bank Perekonomian Rakyat. Dewan Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna adalah sebagai berikut:

   Komisaris Utama : Riwandari Juniasti

   Komisaris : Bambang Widiyanto

   Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam mengelola bank, memberikan advis kepada Direksi sehubungan dengan atas rencana dana pencapaian target usaha, serta memastikan kepatuhan Direksi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta peraturan yang berlaku.

2. Direksi

   Sesuai dengan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 14 Juli 2023 dihadapan Notaris Harinanto Sugiono, diputuskan sebagai berikut :

   Direktur Utama : Muhamad Alwin

   Direktur / membawahkan Fungsi Kepatuhan : Darheni Cahya Noviyanti

   Sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan OJK yang mengatur tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagian Bank Perekonomian Rakyat Direksi bertugas untuk memimpin dan mengelola kegiatan Bank sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, memantau dan mengelola risiko-risiko, serta memastikan pelaksanaan standar tata kelola perusahaan. Selain itu Direksi juga memberikan laporang tentang kinerja bank secara keseluruhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

   Selama tahun 2024 Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, frekwnsi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama 2024 telah dilakukan sebaganyak 5 (lima) kali. Rapat membahas permasalahan yang perlu diketehaui dan atau harus mendapat keputusan segera mungkin, Direksi melaporkan hal-hal yang patut diketahui oleh Dewan Komisaris sebagai pengawas, maupun mendiskusikan strategi-strategi yang diterapkan Direksi dalam pengelolaan PT. BPR Dana Multi Guna.

4. Litigasi

   Selama tahun 2024 tidak terdapat hukum di PT. BPR Dana Multi Guna.

5. kepatuhan

   Direksi telah melakukan sosialisasi peraturan OJK. Peraturan Bank Indonesia dan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perbankan. Terkait dengan Program Anti PencucianUang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dimana PT. BPR Dana Multi Guna telah memiliki P.E APU PPT yang senantiasa melakukan pemantauan dan pelaoran terhadap transaksi nasabah yang mencurigakan.

A.6 Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Hari Indonesia Menabung

- Program Literasi dan Inklusi Keuangan
  Program Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2024, dilaksanakan di :
  1. Program Literasi dan Inklusi Keuangan Semester I Tahun 2024 PT. BPR Dana Multi Guna Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan "Peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Mengakselerasi Pemerataan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Produk Jasa Keuangan"Di Wilayah Kec. Cabangbungin - Kab. Bekasi dilaksanakan pada 24 April 2024.
  2. Program Literasi dan Inklusi Keuangan Semester II Tahun 2024 PT. BPR Dana Multi Guna Dengan tema Akses Keuangan Inklusif. Wujudkan Masyarakat Cerdas. Literasi Keuangan terhadap pelaku UMKM dilaksanakan di Kantor PT. BPR Dana Multi Guna Cikarang Utara-Kab. Bekasi dilaksanakan pada 15 Oktober 2024. Program Literasi Keuangan tetap dilakukan dan disampaikan dan mendapat antusias dari 50 peserta yang hadir, dilihat dari peserta yang antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

- Hari Indonesia Menabung

1. Program Hari Indonesia Menabung Tahun 2024 PT. BPR Dana Multi Guna Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan "Menabung Untuk Indonesiaku"Di SMPN 1 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara – Kab.Bekasi dilaksanakan pada 29 Juli 2024.
2. Program Hari Indonesia Menabung Tahun 2024 PT. BPR Dana Multi Guna Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan "Menabung Untuk Indonesiaku" Di SMPN 3 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara – Kab.Bekasi" dilaksanakan pada 7 Agusutus 2024.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Selama tahun 2024 Manajemen telah mengikut sertakan seluruh pegawai dan pengurus dalam pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara gratis maupun berbiaya, dan yang bersertifikat serta tidak bersertifikat, yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengembangan (2000 karakter)	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan (2000 karakter)
1	Seminar Dampak SAKEP	01 (Jika seluruh pegawai)	2	Seminar SAKEP yang dipergunakan untuk BPR dalam mengelola proses kredit secara terintegrasi.
2	Sosialisasi RBB 2024	01 (Jika seluruh pegawai)	26	Mensosialisasi rencana dari bisns BPR untuk tahun 2025 yang akan dijalankan
3	Pelatihan Menghitung CKPN	01 (Jika seluruh pegawai)	2	Pemahaman penghitungan CKPN
4	Dampak Pembatasan Waktu Penagihan	01 (Jika seluruh pegawai)	8	Ketentuan Waktu dan Tempat Penagihan
5	Sosialisasi RBB 2024	01 (Jika seluruh pegawai)	26	Sosialisasi rencana bisnis BPR
6	Pelatihan Pemasangan Plang pada Agunan	01 (Jika seluruh pegawai)	8	Ketentuan Pemasangan Plang Agunan
7	Seminar Nasional Perlingdungan Data Pribadi	01 (Jika seluruh pegawai)	5	Perlindungan Data Pribadi
8	Pelatihan Excel	01 (Jika seluruh pegawai)	1	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Excel
9	Pelatihan Brand Story	01 (Jika seluruh pegawai)	1	Pelatihan Branding dalam Produksi
10	Pelatihan APUPPT	01 (Jika seluruh pegawai)	2	Pelatihan Pelaporan IRA APUPPT
11	Pelatihan Audit Berbasis Risiko	01 (Jika seluruh pegawai)	1	Pemahaman Audit Berbasis Risiko
12	Seminar Financial Revolution	01 (Jika seluruh pegawai)	5	Metode Peningkatan Keuangan
13	Pelatihan Mengelola Aset BPR	02 (Jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris)	1	Peningkatan Pengelolaan Aset untuk BPR

14	Pelatihan Perhitungan CKPN	02 (Jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris)	1	Perhitungan dalam Penggunaan CKPN
15	Literasi Informasi Top Women 2024	01 (Jika seluruh pegawai)	1	Pendidikan Literasi untuk Wanita
16	Pelatihan Analisa Kredit	01 (Jika seluruh pegawai)	2	Pendidikan untuk Analisa Kredt
17	Seminar Rakernas Perbarindo	02 (Jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris)	1	Seminnar bersamaan dengan Rakernas Perbarindo
18	Pelatihan RBB 2025	02 (Jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris)	2	Pendidikan penyusunan RBB untuk 2025
19	Pelatihan Insurance dan Banking	02 (Jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris)	2	Pendidikan Asuransi dan Perbankan
20	Pelatihan Training APU PPT	01 (Jika seluruh pegawai)	26	Pendidikan APUPPT untuk seluruh karyawan

Program Literasi dan Inklusi Keuangan
Semester I Tahun 2024
PT. BPR Dana Multi Guna
Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan
“Peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Mengakselerasi Pemerataan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Produk Jasa Keuangan”
Di Wilayah Kec. Cabangbungin - Kab. Bekasi

Program Hari Indonesia Menabung 2024
PT. BPR Dana Multi Guna
Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan
“Menabung Untuk Indonesiaku”
Di SMPN 1 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara – Kab.Bekasi

Program Hari Indonesia Menabung 2024
PT. BPR Dana Multi Guna
Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan
“Menabung Untuk Indonesiaku”
Di SMPN 3 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara – Kab.Bekasi”

Program Literasi dan Inklusi Keuangan
Semester II Tahun 2024
PT. BPR Dana Multi Guna
Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Keuangan
“Akses Keuangan Inklusif Masyarakat Cerdas.”
Di Kantor PT. BPR Dana Multi Guna Kec. Cikarang Utara – Kab.Bekasi

B.3. NERACA

LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT. BPR DANA MULTI GUNA
Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam satuan Rupiah)

ASET	Posisi Desember 2024	Posisi Desember 2023
Kas dalam Rupiah	46,675,400.00	120,556,900.00
Kas dalam Valuta Asing	-	-
Surat Berharga	-	-
Penempatan pada Bank Lain	8,670,351,291.00	7,770,668,063.00
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Jumlah	**8,670,351,291.00**	**7,770,668,063.00**
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-
c. Kepada non bank - pihak terkait	283,843,350.00	350,666,672.00
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	20,590,260,629.00	22,050,762,898.00
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	810,343,551.00	499,818,017.00
Jumlah	**20,063,760,428.00**	**21,901,611,553.00**
Penyertaan Modal	**-**	**-**
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**-**	**-**
Jumlah	**-**	**-**
Agunan yang Diambil Alih	-	-
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	-	
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	-	-
c. Inventaris	1,707,379,170.00	1,699,049,570.00
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	1,488,888,015.00	1,453,327,975.00
Aset tidak berwujud	57,225,000.00	57,225,000.00
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	57,224,995.00	53,100,010.00
Aset lainnya	1,516,000,626.00	699,353,998.00
Total Aset	**30,515,278,905.00**	**30,742,037,099.00**

B.3. NERACA

LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT. BPR DANA MULTI GUNA
Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam satuan Rupiah)

LIABILITAS	Posisi Desember 2024	Posisi Desember 2023
Liabilitas Segera	106,305,260.00	118,945,153.00
Simpanan		
a. Tabungan	3,151,490,083.00	3,161,968,531.00
b. Deposito	15,760,063,349.00	15,976,048,988.00
Simpanan dari Bank Lain	3,800,000,000.00	4,050,000,000.00
Pinjaman yang Diterima	-	-
Dana Setoran Modal - Kewajiban	-	-
Liabilitas Lainnya	654,924,150.00	707,815,239.00
Total Liabilitas	**23,472,782,842.00**	**24,014,777,911.00**
EKUITAS	**Posisi Desember 2024**	**Posisi Desember 2023**
Modal		
a. Modal Dasar	10,000,000,000.00	6,000,000,000.00
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3,800,000,000.00	1,000,000,000.00
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)	-	-
b. Modal Sumbangan	-	-
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	-
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	-	-
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai	-	-
Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia		
untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-
c. Lainnya	-	
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	-	
Cadangan		
a. Umum	420,000,000.00	410,000,000.00
b. Tujuan	98,891,966.00	98,891,966.00
Laba (Rugi)		
a. Tahun - tahun Lalu	8,367,222.00	712,000,179.00
b. Tahun Berjalan	315,236,875.00	506,367,043.00
Total Ekuitas	**7,042,496,063.00**	**6,727,259,188.00**

- -

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI
PT. BPR DANA MULTI GUNA
Tanggal : 31 Desember 2024

(Ribuan Rp)

POS	Posisi Desember 2024	Posisi Desember 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	5,337,577,415.00	5,361,035,411.00
b. Provisi Kredit	329,797,821.00	331,736,435.00
c. Biaya Transaksi -/-	-	
Jumlah Pendapatan Bunga	5,667,375,236.00	5,692,771,846.00
Pendapatan Lainnya	1,156,554,609.00	750,627,802.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**6,823,929,845.00**	**6,443,399,648.00**
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	1,489,390,802.00	1,388,623,275.00
b. Biaya Transaksi	-	1,080,000.00
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	-	-
Beban Kerugian Penurunan Nilai	916,955,692.00	465,660,791.00
Beban Pemasaran	24,836,500.00	94,888,642.00
Beban Penelitan dan Pengembangan	-	-
Beban Administrasi dan Umum	3,940,342,087.00	3,840,985,051.00
Beban Lainnya	5,497,300.00	6,713,500.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**6,377,022,381.00**	**5,797,951,259.00**
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**446,907,464.00**	**645,448,389.00**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	9,033,444.00	6,082,622.00
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan / Kehilangan	-	-
Lainnya	85,507,036.00	61,603,833.00
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**(76,473,592.00)**	**(55,521,211.00)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**370,433,872.00**	**589,927,178.00**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	**55,196,997.00**	**83,560,135.00**
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**315,236,875.00**	**506,367,043.00**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait	-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset	-	-
Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-	-
b. Lainnya	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI PUBLIKASI
PT. BPR DANA MULTI GUNA
Tanggal 31 Desember 2024

Deskripsi	Posisi Desember 2024	Posisi Desember 2023
TAGIHAN KOMITMEN	**272,315,650.00**	**272,315,650.00**
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	-	-
b. Tagihan Komitmen lainnya	272,315,650.00	272,315,650.00
KEWAJIBAN KOMITMEN	**-**	**-**
a. Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
b. Penerusan kredit	-	-
c. Kewajiban Komitmen lainnya	-	-
TAGIHAN KONTINJENSI	5,031,746,573.00	2,781,092,791.00
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	3,195,322,735.00	2,488,490,296.00
b. Aset produktif yang dihapus buku	1,836,423,838.00	292,602,495.00
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	-	-
KEWAJIBAN KONTINJENSI	**-**	**-**
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	**-**	**-**

PT BPR DANA MULTI GUNA

LAPORAN PERUBAHAN POSISI EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Satuan Rupiah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
I. Ekuitas Awal		
Modal saham	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Saldo laba awal tahun	1,218,367,222.00	712,000,179.00
Cadangan Umum	508,891,966.00	508,891,966.00
	-	-
Jumlah Ekuitas awal	**6,727,259,188.00**	**6,220,892,145.00**
2. Penambahan (Pengurangan)		
Modal saham	1,200,000,000.00	-
Laba tahun berjalan	315,236,875.00	506,367,043.00
Cadangan umum		
Koreksi laba/ rugi tahun lalu		
Pembagian laba		
(Deviden & Imbalan Pasca Kerja)		
Jumlah Penambahan (Pengurangan)	**1,515,236,875.00**	**506,367,043.00**
3. Ekuitas Akhir		
Modal saham	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Saldo laba akhir tahun	1,533,604,097.00	1,218,367,222.00
Cadangan umum	508,891,966.00	508,891,966.00
Jumlah Ekuitas akhir	**7,042,496,063.00**	**6,727,259,188.00**

PT. BPR DANA MULTI GUNA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024

Dalam Satuan Rupiah

Uraian	Tahun 2024 (Rupiah)	Tahun 2023 (Rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG		
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba netto menjadi kas bersih		
diperoleh dari kegiatan operasi		
Penerimaan Pendapatan Bunga	5,337,577,415.00	5,361,035,411.00
Penerimaan Pendapatan Provisi dan Jasa transaksi	329,797,821.00	331,736,435.00
Penerimaan beban klaim asuransi	-	
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	108,960,112.00	
Pendapatan Operasional lainnya	1,047,594,497.00	750,627,802.00
Pembayaran beban bunga	(1,489,390,802.00)	(1,389,703,275.00)
Beban gaji dan tunjangan	(2,884,960,059.00)	(2,726,045,760.00)
beban Umum dan Administrasi	1,020,858,503.00	(1,136,589,451.00)
Beban Operasional lainnya	(5,497,300.00)	(6,713,500.00)
Pendapatan Non Operasional Lainnya	9,033,444.00	6,082,622.00
Beban Non Operasional lainnya	(85,507,036.00)	(61,603,833.00)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(55,196,997.00)	(83,560,135.00)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(976,315,717.00)	(530,899,273.00)
Penurunan/ Peningkatan atas aset Operasional		
Penempatan Pada bank lain	(899,683,229.00)	(1,773,506,745.00)
Kredit yang diberikan	1,527,325,591.00	(1,912,927,295.00)
Agunan yang diambilalih	-	
Aset lain-lain	(816,646,628.00)	238,015,726.00
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	341,880,960.00	380,714,646.00
Penurunan/ Peningkatan atas liabilitas Operasional		
Liabilitas Segera	(33,027,003.00)	(5,345,602.00)
Tabungan	(10,478,448.00)	168,008,053.00
Deposito	(215,985,630.00)	1,310,240,497.00
Simpanan dari bank lain	(250,000,000.00)	700,000,000.00
Liabilitas Imbalan Kerja	(36,283,768.00)	180,000,000.00
Liabilitas lain-lain	3,779,789.00	67,860,712.00
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
ARUS KAS NETTO DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	**(73,881,499.00)**	**(140,572,965.00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan / pembayaran pinjaman yang diterima		
sebagai pelengkap		
Penerimaan / pembayaran pinjaman yang diterima	1,210,000,000.00	59,897,800.00
sebagai Modal inti tambahan		
Pembayaran Deviden	(1,210,000,000.00)	
Penyesuaian Lainnya		72,672,265.00
ARUS KAS NETTO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**132,570,065.00**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(73,881,499.00)	(8,002,900.00)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	120,556,900.00	128,559,800.00
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**46,675,401.00**	**120,556,900.00**

LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR DANA MULTI GUNA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

BESERTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024	
Neraca Per 31 Desember 2024	1
Laporan Laba Rugi untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024	2
Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berkahir 31 Desember 2024	3
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
Rasio Keuangan	I - IV

BPR DMG
simpel.fleksibel

GRAHA MULTI GUNA Jl. Ki Hajar Dewantara No.63 Cikarang Utara, Bekasi 17534
www.bprdmg.com
customer-service@bankdmg.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Alwin

Alamat : Bumi Sani Residence Blok C No.8, Kel. Setiamekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi

Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Dana Multi Guna.
2. Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Dana Multi Guna telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan PT. BPR Dana Multi Guna tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan PT. BPR Dana Multi Guna sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
6. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan bagi PT. BPR Dana Multi Guna.
7. Kami meyakini bahwa teknologi informasi yang digunakan telah cukup memadai yang menjamin keandalan pengendalian internal IT.

Bekasi, 10 Maret 2025
PT. BPR DANA MULTI GUNA

BPR DMG

Muhamad Alwin
Direktur Utama

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NANO SUYATNA,SE.,Ak.,CPA.
Audit, Accounting and Management Solutions

Surat Ijin Usaha Kep.Men.Keu RI No. 552/KM.1/2017 dan Ijin OJK STTD.KAP-179/PM.2/2018

Nomor : 00009/2.1117/AU.2/07/1331-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham
PT BPR Dana Multi Guna
Jl. KH. Dewantara No. 63, RT/RW. 001/006,
Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT BPR DANA MULTI GUNA** yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar tanpa pengecualian kami.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT BPR DANA MULTI GUNA** per 31 Desember 2023 untuk tahun sebelumnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk

memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait

dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan,termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Nano Suyatna, SE,. Ak,. CPA
Rekan,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK NANO SUYATNA

00009

Nano Suyatna, SE,. Ak,. CPA
No. Izin AP : 1331
No. Izin UKAP : 552/KM.1/2017
Bandung, 10 Maret 2025

PT BPR DANA MULTI GUNA
NERACA
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.1	46,675,400.00	120,556,900.00
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	3.2	576,173,202.80	601,070,204.00
Penempatan Pada Bank Lain	3.3	8.670.351.291.79	7.770.668.063.00
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain	3.3	-	-
Kredit Yang Diberikan	3.4	20,874,103,979.00	22,401,429,570.00
Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan	3.4	(810,343,551.00)	(499,818,017.00)
JUMLAH ASET LANCAR		**29,356,960,322.59**	**30,393,906,720.00**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Nilai Buku	3.5	218,491,155.00	245,721,595.00
Aset Tidak Berwujud - Nilai Buku	3.6	5.00	4,124,990.00
Aset Lainnya	3.7	939,827,423.00	98,283,794.00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**1,158,318,583.00**	**348,130,379.00**
JUMLAH ASET		**30,515,278,906.24**	**30,742,037,099.00**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Dibayar	3.8	106,305,260.45	118,945,153.00
Hutang Bunga	3.9	65,429,928.00	69,261,140.00
Hutang Pajak	3.10	21,040,665.00	37,596,563.00
Simpanan	3.11	22,711,553,432.30	23,188,017,519.00
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	3.12	406,813,056.00	443,096,824.00
Kewajiban Lain-lain	3.13	161,640,501.00	157,860,712.00
JUMLAH KEWAJIBAN		**23,472,782,842.75**	**24,014,777,911.00**
EKUITAS			
MODAL SAHAM			
Modal Saham	3.14	6,200,000,000.00	5,000,000,000.00
Saldo Laba	3.15		
Cadangan Umum		420,000,000.00	410,000,000.00
Cadangan Tujuan		98,891,966.00	98,891,966.00
Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya			
Laba (Rugi) Tahun Lalu		1,218,367,222.00	712,000,179.00
Selisih atas Laba Rugi Tahun Lalu		-	-
Deviden		(1,210,000,000.00)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak		315,236,875.49	506,367,043.00
JUMLAH EKUITAS		**7,042,496,063.49**	**6,727,259,188.00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**30,515,278,906.24**	**30,742,037,099.00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bekasi, 10 Maret 2025
Direktur Utama

BPR - DMG

Tn. Muhamad Alwin

PT BPR DANA MULTI GUNA
LABA RUGI
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga Kontraktual	3.16	5,337,577,415.00	5,361,035,411.00
Provisi	3.16	329,797,821.00	331,736,435.00
Jumlah Pendapatan Bunga		**5,667,375,236.00**	**5,692,771,846.00**
Beban Bunga			
Beban Bunga Kontraktual	3.17	1,489,390,802.00	1,389,703,275.00
Jumlah Beban Bunga		**1,489,390,802.00**	**1,389,703,275.00**
Pendapatan Bunga (Neto)		4,177,984,434.00	4,303,068,571.00
Pendapatan Operasional Lainnya	3.16	1,156,554,609.00	750,627,802.00
Jumlah Pendapatan Operasional		**5,334,539,043.00**	**5,053,696,373.00**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3.18	916,955,692.00	465,660,791.00
Beban Pemasaran	3.18	24,836,500.00	94,888,642.00
Beban Administrasi dan Umum	3.18	3,940,342,087.00	3,840,985,051.00
Beban Operasional Lainnya	3.18	5,497,300.00	6,713,500.00
Jumlah Beban Operasional		**4,887,631,579.00**	**4,408,247,984.00**
LABA RUGI OPERASIONAL		**446,907,464.00**	**645,448,389.00**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	3.19		
Pendapatan Non Operasional		9,033,444.00	6,082,622.00
Beban Non Operasional		85,507,036.00	61,603,833.00
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		**(76,473,592.00)**	**(55,521,211.00)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**370,433,872.00**	**589,927,178.00**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	3.20	**55,196,997.00**	**113,781,816.00**
LABA (RUGI) NETO		**315,236,875.49**	**476,145,362.00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bekasi, 10 Maret 2025
Direktur Utama

BPR DMG

Tn. Muhamad Alwin

PT BPR DANA MULTI GUNA
PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	MODAL DISETOR	CADANGAN	SALDO LABA	DEVIDEN	TOTAL MODAL BERSIH
Saldo per 1 Januari 2023	5,000,000,000.00	508,891,966.00	712,000,179.00	0.00	6,220,892,145.00
Penambahan/Pengurangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendistribusian Laba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Laba Tahun Berjalan	0.00	0.00	506,367,043.00	0.00	506,367,043.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	**5,000,000,000.00**	**508,891,966.00**	**1,218,367,222.00**	0.00	**6,727,259,188.00**
Penambahan/Pengurangan	1,200,000,000.00	10,000,000.00	(1,210,000,000.00)	0.00	0.00
Laba Tahun Berjalan	0.00	0.00	315,236,875.49	0.00	315,236,875.49
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	**6,200,000,000.00**	**518,891,966.00**	**323,604,097.49**	**0.00**	**7,042,496,063.49**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR DANA MULTI GUNA
ARUS KAS
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG		
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penerimaan pendapatan bunga	5,337,577,415	5,361,035,411
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	329,797,821	331,736,435
Penerimaan beban klaim asuransi	-	-
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	108,960,112	-
Pendapatan operasional lainnya	1,047,594,497	750,627,802
Pembayaran beban bunga	(1,489,390,802)	(1,389,703,275)
Beban gaji dan tunjangan	(2,884,960,059)	(2,726,045,760)
Beban umum dan administrasi	(1,020,858,503)	(1,136,589,451)
Beban operasional lainnya	(5,497,300)	(6,713,500)
Pendapatan non operasional lainnya	9,033,444	6,082,622
Beban non operasional lainnya	(85,507,036)	(61,603,833)
Pembayaran pajak penghasilan	(55,196,997)	(83,560,135)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(976,315,717)	(538,899,273)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(899,683,229)	(1,773,506,745)
Kredit yang diberikan	1,527,325,591	(1,912,927,295)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	(816,646,628)	238,015,726
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	341,880,960	380,714,646
Penurunan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(33,027,003)	(5,345,602)
Tabungan	(10,478,448)	168,008,053
Deposito	(215,985,639)	1,310,240,497
Simpanan dari bank lain	(250,000,000)	700,000,000
Liabilitas imbalan kerja	(36,283,768)	180,000,000
Liabilitas lain-lain	3,779,789	67,860,712
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	**(73,881,499)**	**(140,572,965)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	1,210,000,000	59,897,800
Pembayaran dividen	(1,210,000,000)	
Penyesuaian lainnya	-	72,672,265
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**132,570,065**
KENAIKAN (PENURUNAN) PENURUNAN ARUS KAS	**(73,881,499)**	**(8,002,900)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**120,556,900**	**128,559,800**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**46,675,400**	**120,556,900**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Laporan Keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010. Laporan Keuangan disusun berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar dan disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama 1 (satu) periode yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

2. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

3. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah jika :

i. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara pihak tersebut :
   1. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries) ;
   2. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
   3. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;

ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas

iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venturer

iv. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya

v. Pihak tersebut adalah keluarga dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv)

vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v) ; atau

vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

4. Kas

Kas meliputi seluruh uang kertas dan logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berada di Kas.

5. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

6. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain terdiri dari : giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito berjangka pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum diakui sebesar nilai nominal. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penempatan tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari saldo penempatan tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

7. Kredit

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit atau baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima. Bunga kredit non-performing diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

8. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.

Rekstrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Cara Restrukturisasi yaitu :

- Modifikasi persyaratan kredit : penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan
- Penambahan fasilitas kredit : *fresh money* atau konversi tunggakan bunga.

9. Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian/ penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi komitmen dan kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontijensi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan aset produktif adalah penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, dan penyertaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

9. Penyisihan Kerugian (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat Pasal 16 bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif. Kemudian OJK menetapkan peraturan PPKA dan CKPN dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dalam pasal 19 sebagai berikut :

Cadangan Umum :

- 0,50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

Cadangan Khusus :

- 3 % dari seluruh aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan
- 10% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
- 50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan.
- 100% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurang dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA sebagai berikut :

- 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

9. Penyisihan Kerugian (Lanjutan)

- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; dan
- 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

10. Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari :

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi, dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi (jika ada).

Penyusutan Aset tetap dan inventaris :

1. Disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
2. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan misalnya aset berada dilokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen.
3. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/KMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Prosentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut :

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

NO	Aset Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif (%)
I.	Bukan Bangunan :		
	Kelompok 1	4	25%
	Kelompok 2	8	12,5%
	Kelompok 3	16	6,25%
	Kelompok 4	20	5%
II.	Bangunan :		
	Permanen	20	5%
	Tidak Permanen	10	10%

11. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka (disajikan dalam akun aset lain-lain) diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line meth od*).

12. Kewajiban Segera Dibayar

Kewajiban segera merupakan kewajiban BPR kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban BPR.

13. Simpanan

Giro, tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal, dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

14. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).

a. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga.
b. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit (yang ditanggung oleh BPR, jika ada) diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga.
c. Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing.
d. Dengan mempertimbangkan azas manfaat dan biaya bagi industri BPR maka provisi dan biaya transaksi untuk kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan diakui sekaligus sebagai pendapatan bunga, kecuali kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan yang jatuh temponya melewati tanggal neraca.

15. Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban atas provisi komisi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkreditan dan terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan dan beban ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya.

16. Beban Bunga

a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.
b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back dan hadiah deposito berjangka.
c. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.

17. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan.

18. Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban imbalan kerja merupakan imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terhutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang didiskontokan.
Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah didiskonto (*discounted amount*).

PT. BPR DANA MULTIGUNA sampai saat ini mengadopsi ketentuan pemberian imbalan pasca kerja sesuai UU No. 11 Tahun 2020 kemudian dirubah kembali dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke dalam peraturan intern perusahaan. Diimplementasikan dengan membayar iuran DPLK sebesar Rp. 406.813.056,- pada tahun 2024. Undang-undang ini merupakan perubahan dari ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003.

3. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

3.1 Risiko Likuiditas

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

3.2 Risiko Kredit

Salah satu risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat adalah risiko kredit atau credit risk yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibiitas kredit.

Manajemen risiko kredit yang dilakukan BPR diantaranya dengan :

a. Pengendalian intern kredit
b. Alokasi kredit BPR
c. Analisis permohonan kredit
d. Penerapan prinsip kehati-hatian

3.3 Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mepengaruhi Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghaspusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank. pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.

3.4 Risiko Permodalan

Risiko Modal adalah risiko yang muncul akibat penurunan kualitas aset, karena adanya kredit macet, yang memaksa bank untuk menerbitkansaham baru dan/atau penambahan setoran modal oleh pemilik, atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan.

3.5 Risiko Pasar

Perseroan memiliki ekposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas dimasa depan dari instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar.

- Risiko Nilai Tukar Mata Asing.

  Perseroan mengalami risiko kurs mata uang asing yang timbul dari berbagai mata uang terutama yang berhubungan dengan US Dollar, Euro. Risiko kurs timbul dari transaksi perdagangan dimasa depan, aset yang diakui dan kewajiban serta investasi bersih pada kegiatan operasi. Peningkatan atau penurunan nilai mata uang asing dapat berpengaruh pada laba Perseroan.

- Risiko Tingkat Bunga yang Wajar dan Arus Kas

  Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuatif karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai wajar suku bunga adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

3. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

3.5 Risiko Pasar (Lanjutan)

- Risiko Harga
  Merupakan risiko yang ditanggung oleh investor karena penurunan harga pada saat menjual aset, sehingga jumlah yang diterima akan berkurang. Risiko ini timbul karena tidak adanya kepastian nilai pasar suatu aset atau aset dimasa depan.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut adalah saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Kas Besar	46,675,400.00	120,556,900.00
Jumlah Kas Setara Kas	**46,675,400.00**	**120,556,900.00**

3.2 PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Jumlah tersebut adalah saldo pendapatan bunga yang akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
PYAD Kredit yang diberikan	548,840,327.00	577,917,975.00
PYAD Penempatan Pada Bank Lain	27,332,875.80	23,152,229.00
Jumlah PiHHutang Usaha	**576,173,202.80**	**601,070,204.00**

3.3 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Jumlah tersebut adalah saldo penempatan pada bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Penempatan Giro :		
Giro Bank BCA - 3433004619	150,750,653.79	142,553,675.00
Giro Bank Mandiri - 1560000513855	950,000.00	1,225,000.00
Giro Bank Danamon - 003548397201	6,127,056.00	5,841,993.00
Giro Bank BNI - 6363630061	43,235,912.00	10,363,145.00
Penempatan Tabungan :		
Tabungan Mandiri Bisnis - 1560000527228	507,108,629.00	616,473,220.00
Tabungan Bank BNI - 6363630027	51,602,491.00	52,152,342.00
Tabungan Victoria Bisnis	1,469,357,504.00	1,400,875,723.00
Tabungan BPR Menaramas Mitra	1,219,046.00	1,182,965.00
Deposito Berjangka - Bank BNI	250,000,000.00	250,000,000.00
Deposito Berjangka - Bank Victoria	40,000,000.00	40,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Cibitung Tanjung Raya	750,000,000.00	1,000,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Antar Guna	550,000,000.00	300,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Ina Perdana	500,000,000.00	-
Deposito Berjangka - BPR Dana Karunia Sejahtera	300,000,000.00	550,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Rama Ganda	500,000,000.00	750,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Artha Bersama	250,000,000.00	800,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Modern Express	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Binadana Makmur	-	500,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Bahtera Masyarakat Jabar	-	250,000,000.00
Deposito Berjangka - BPR Arta Pundi Mekar	500,000,000.00	-
Deposito Berjangka - BPR Lainnya	1,700,000,000.00	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**8,670,351,291.79**	**7,770,668,063.00**

PENYISIHAN KERUGIAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Jumlah tersebut adalah saldo penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian berdasarkan kualitas aset produktif sebagai berikut :

Penyisihan Kerugian	-	-
Jumlah Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain	**-**	**-**

3.4 KREDIT YANG DIBERIKAN

Jumlah tersebut adalah kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kredit Modal Kerja	15,944,266,839.00	16,741,288,491.00
Kredit Investasi	1,485,474,032.00	1,318,578,021.00
Kredit Konsumtif	3,391,808,373.00	4,264,471,696.00
Kredit Pegawai	478,805,554.00	530,375,002.00
Jumlah Kredit Yang Diberikan	**21,300,354,798.00**	**22,854,713,210.00**
Rincian Berdasarkan Kolektibilitas		
Lancar	9,140,316,784.00	12,295,602,886.00
Dibawah Perhatian Khusus	6,601,858,908.00	6,305,795,588.00
Kurang Lancar	288,995,184.00	318,450,539.00
Diragukan	868,217,828.00	547,734,079.00
Macet	4,400,966,094.00	3,387,130,118.00
Provisi	(426,250,819.00)	(453,283,640.00)
Jumlah Kredit Yang Diberikan Setelah Dikurangi Provisi	**20,874,103,979.00**	**22,401,429,570.00**
Jumlah Kredit yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa		
Terkait	284,333,344.00	350,666,672.00
Tidak Terkait	21,016,021,454.00	22,504,046,538.00

- *Kredit dijamin dengan jaminan tunai (cash colateral) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan dibawah tangan serta jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.*

- *Tingkat Suku Bunga Kredit Terkait dan Tidak Terkait berkisar antara 4% s/d 36 %. Tidak ada perlakuan istimewa atas Pihak-pihak terkait.*
- *Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Jumlah plafond kredit yang diberikan kepada pihak terkait sebesar Rp. 495.000.000 terdiri dari 2 (dua) debitur dengan baki debet per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 284.333.344,- Kualitas kredit dikategorikan lancar, tidak dijumpai ketidakwajaran dalam transaksi dengan pihak-pihak terkait serta tidak terdapat pula perlakuan khusus kepada pihak-pihak istimewa.*

Penyisihan Kerugian Kredit		
Lancar	(45,701,582.00)	(61,478,012.00)
Dibawah Perhatian Khusus	(12,494,132.00)	(13,504,550.00)
Kurang Lancar	(1,347,504.00)	(930,278.00)
Diragukan	-	(476,668.00)
Macet	(750,800,333.00)	(423,428,509.00)
Jumlah Penyisihan Kerugian Kredit	**(810,343,551.00)**	**(499,818,017.00)**
PPAPWD YANG DIBENTUK	**(810,343,551.00)**	**(499,818,017.00)**
KELEBIHAN /(KEKURANGAN)	**-**	**-**

3.5 ASET TETAP DAN INVENTARIS

Jumlah tersebut adalah saldo aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

31-Dec-2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Kendaraan	608,055,000.00	25,150,000.00	19,675,000.00	613,530,000.00
Inventaris Kantor	1,090,994,570.00	2,854,600.00	-	1,093,849,170.00
Jumlah Nilai Perolehan	**1,699,049,570.00**	**28,004,600.00**	**19,675,000.00**	**1,707,379,170.00**
Akum. Penyusutan				
Kendaraan	(378,688,528.00)	(42,668,325.00)	(19,675,000.00)	(401,681,853.00)
Inventaris Kantor	(1,074,639,447.00)	(12,566,715.00)	-	(1,087,206,162.00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**(1,453,327,975.00)**	**(55,235,040.00)**	**(19,675,000.00)**	**(1,488,888,015.00)**
Nilai Buku	**245,721,595.00**			**218,491,155.00**

Lanjutan Aset Tetap dan Inventaris

31-Dec-2023

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Kendaraan	614,240,000.00	-	6,185,000.00	608,055,000.00
Inventaris Kantor	1,137,586,070.00	12,733,500.00	59,325,000.00	1,090,994,570.00
Jumlah Nilai Perolehan	**1,751,826,070.00**	**12,733,500.00**	**65,510,000.00**	**1,699,049,570.00**
Aku. Penyusutan				
Kendaraan	(366,467,698.00)	(37,405,830.00)	(25,185,000.00)	(378,688,528.00)
Inventaris Kantor	(1,110,686,544.00)	(23,277,903.00)	(59,325,000.00)	(1,074,639,447.00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**(1,477,154,242.00)**	**(60,683,733.00)**	**(84,510,000.00)**	**(1,453,327,975.00)**
Nilai Buku	**274,671,828.00**			**245,721,595.00**

3.6 ASET TIDAK BERWUJUD

Jumlah tersebut adalah saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

31-Dec-24

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Program Aplikasi	57,225,000.00	-	-	57,225,000.00
Jumlah Nilai Perolehan	**57,225,000.00**	**-**	**-**	**57,225,000.00**
Aku. Penyusutan				
Program Aplikasi	(53,100,010.00)	(4,124,985.00)	-	(57,224,995.00)
Jumlah Akumulasi	**(53,100,010.00)**	**(4,124,985.00)**	**-**	**(57,224,995.00)**
Nilai Buku	**4,124,990.00**			**5.00**

31-Dec-23

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Program Aplikasi	64,346,300.00	-	7,121,300.00	57,225,000.00
Jumlah Nilai Perolehan	**64,346,300.00**	**-**	**7,121,300.00**	**57,225,000.00**
Aku. Penyusutan				
Program Aplikasi	(47,666,561.00)	(12,554,749.00)	(7,121,300.00)	(53,100,010.00)
Jumlah Akumulasi	**(47,666,561.00)**	**(12,554,749.00)**	**(7,121,300.00)**	**(53,100,010.00)**
Nilai Buku	**16,679,739.00**			**4,124,990.00**

3.7 ASET LAIN - LAIN

Jumlah tersebut adalah aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya Dibayar Dimuka		
Biaya Dibayar Dimuka	856,177,500.00	8,775,134.00
Premi Asuransi	31,485,844.00	26,530,360.00
Uang Muka Lainnya	40,882,979.00	53,240,000.00
Lainnya		
Persediaan Habis Pakai	1,000,000.00	1,000,000.00
Deposit Jaminan	1,781,100.00	8,738,300.00
Lainnya	8,500,000.00	-
Jumlah Aset Lain-lain	**939,827,423.00**	**98,283,794.00**

Informasi Beban Sewa Dibayar Dimuka

Jangka Waktu : 05 April 2024 - 04 April 2028
Nilai Sewa : Rp. 1.050.000.000,- per 4 (Empat) tahun
Alamat Sewa : JL. KH. Dewantara No. 63, Cikarang, Bekasi.

3.8 KEWAJIBAN SEGERA DIBAYAR

Jumlah tersebut adalah kewajiban segera dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pph Pasal 4 Ayat 2 Tabungan & Deposito	17,825,061.00	17,760,506.00
PPh Pasal 21	38,267,321.00	55,408,937.00
Titipan Nasabah	44,940,433.00	40,830,646.00
Kewajiban Segera Lainnya	5,272,445.45	4,945,064.00
Jumlah Investasi	**106,305,260.45**	**118,945,153.00**

3.9 HUTANG BUNGA

Jumlah tersebut adalah Hutang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Hutang Bunga Deposito & Tabungan Yang Masih Harus Dibayar	65,429,928.00	69,261,140.00
Jumlah Hutang Bunga	**65,429,928.00**	**69,261,140.00**

3.10 HUTANG PAJAK

Jumlah tersebut adalah Hutang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pph Pasal 29	21,040,665.00	37,596,563.00
Jumlah Hutang Pajak	**21,040,665.00**	**37,596,563.00**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan, dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Sebelum Pajak				**370,433,872.00**		**589,927,178.00**
Koreksi Fiskal :						
Biaya Non Operasional				16,296,000.00		14,998,200.00
Penghasilan Kena Pajak				**386,729,872**		**604,925,378**
Tahun 2024						
Penghasilan kena Pajc :						
4,800,000,000 / 6,832,963,289	X	386,729,872	=	271,668,866		
	11% ->		a	29,883,575		
386,729,872	-	271,668,866	=	115,061,006		
	22%->		b	25,313,421		
Taksiran Hutang Pajak	**(a+b)**			**55,196,997**		
Kredit Pajak :						
PPh Pasal 25				34,156,332		
PPh Pasal 29 / kurang Bayar				**21,040,665**		
Tahun 2023						
Penghasilan Kena Pajak :						
4,800,000,000 / 6,449,482,270	X	604,925,378			=	450,213,163
	11% ->				c	49,523,448
604,925,378	-	450,213,163			=	154,712,215
					b	34,036,687
Taksiran Hutang Pajak	**(a+b)**					**83,560,135**
Kredit Pajak :						
PPh Pasal 25						45,963,572
PPh Pasal 29 / kurang Bayar						**37,596,563**

3.11 SIMPANAN

Jumlah tersebut adalah simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
TABUNGAN		
Tabungan Nasabah	3,151,490,083.00	3,161,968,531.00
Jumlah Tabungan	**3,151,490,083.00**	**3,161,968,531.00**
DEPOSITO		
Deposito Simpanan Nasabah		
Deposito 1 Bulan	7,913,111,336.30	8,434,593,559.00
Deposito 3 Bulan	1,847,613,290.00	1,327,343,645.00
Deposito 6 Bulan	835,414,284.00	344,595,742.00
Deposito 12 Bulan	5,163,924,439.00	5,869,516,042.00
Deposito Bank Lain	3,800,000,000.00	4,050,000,000.00
Jumlah Deposito	**19,560,063,349.30**	**20,026,048,988.00**
JUMLAH SIMPANAN	**22,711,553,432.30**	**23,188,017,519.00**
Rincian Tabungan yg mempunyai hub.istimewa :		
Terkait	1,166,754,160	727,634,608
Tidak Terkait	1,984,735,923.00	2,434,333,923.00
Rincian Deposito yg mempunyai hub.istimewa :		
Terkait	3,800,000,000.00	4,070,603,614.00
Tidak Terkait	15,760,063,349.30	15,955,445,374.00

Tingkat Bunga Tabungan adalah 1% - 1,5%. Tingkat bunga Deposito terkait maupun tidak terkait antara 3,5% - 6,75 %.

3.12 KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Jumlah tersebut adalah kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja **Lihat Kebijakan Akuntansi poin 2.18*	406,813,056.00	443,096,824.00
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	**406,813,056.00**	**443,096,824.00**

3.13 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Jumlah tersebut adalah kewajiban lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Titipan Lainnya	161,640,501.00	157,860,712.00
Jumlah Kewajiban Lain-lain	**161,640,501.00**	**157,860,712.00**

3.14 Modal Saham

Jumlah tersebut adalah saldo modal saham per 31 Desember 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

2024			
Pemegang Saham	**Modal Disetor**	**Prosentase**	**Jumlah (Rp)**
Ny. Riwandari Juniasti	4,185.00	67.50%	4,185,000,000.00
Nn. Darheni Cahya Noviyanti	1,240.00	20.00%	1,240,000,000.00
Tn. Drs. H. Soenarko	775.00	12.50%	775,000,000.00
Jumlah	**6,200.00**		**6,200,000,000.00**

3.15 SALDO LABA

Jumlah tersebut adalah saldo laba per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Cadangan Umum	420,000,000.00	410,000,000.00
Cadangan Khusus	98,891,966.00	98,891,966.00
Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya		
Laba (Rugi) Tahun Lalu	1,218,367,222.00	712,000,179.00
Deviden	(1,210,000,000.00)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak	315,236,875.49	506,367,043.00
Jumlah Saldo Laba	**842,496,063.49**	**1,727,259,188.00**

3.16 PENDAPATAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut adalah pendapatan operasional per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
PENDAPATAN BUNGA		
A. BUNGA KONTRAKTUAL		
PENEMPATAN PADA BANK LAIN :		
- Pendapatan Bunga Dari Tabungan	17,608,849.00	16,155,074.00
- Pendapatan Bunga Dari Deposito	450,794,765.00	324,504,280.00
- Pendapatan Bunga Dari Jasa Giro	74,658.00	49,549.00
Jumlah Bunga Kontraktual Pada Bank Lain	**468,478,272.00**	**340,708,903.00**
PIHAK KETIGA BUKAN BANK:		
- Pendapatan Bunga Kredit Bukan Bank	4,869,099,143.00	5,020,326,508.00
Jumlah Bunga Kontraktual Pihak Ketiga Bukan Bank	**4,869,099,143.00**	**5,020,326,508.00**
B. PROVISI KREDIT		
- Pendapatan Bunga Dari Provisi Kredit	329,797,821.00	331,736,435.00
Jumlah Provisi Kredit	**329,797,821.00**	**331,736,435.00**
Jumlah Pendapatan Bunga	**5,667,375,236.00**	**5,692,771,846.00**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan Administrasi Tabungan & Deposito	38,893,921.00	77,880,797.00
Pendapatan Kredit Hapus Buku	108,960,112.00	0.00
Pendapatan Tutup Buku Tabungan	5,628,234.00	28,076,284.00
Pendapatan Pemulihan PPAP - CKPN Kredit	606,430,158.00	158,184,627.00
Pendapatan Lainnya	396,642,184.00	486,486,094.00
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**1,156,554,609.00**	**750,627,802.00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**6,823,929,845.00**	**6,443,399,648.00**

3.17 BEBAN BUNGA

Jumlah tersebut adalah saldo beban bunga per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
PIHAK KETIGA LAINNYA		
Beban Bunga Tabungan	41,323,585.00	40,447,805.00
Beban Bunga Deposito	1,133,184,313.00	1,033,932,778.00
Biaya Transaksi	-	1,080,000.00
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Bank Umum	**1,174,507,898.00**	**1,075,460,583.00**
PIHAK KETIGA BANK UMUM		
Beban Tabungan, Deposito dan Lainnya	265,894,506.00	267,916,093.00
Beban Bunga Lainnya	48,988,398.00	46,326,599.00
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Lainnya	**314,882,904.00**	**314,242,692.00**
Jumlah Beban Bunga	**1,489,390,802.00**	**1,389,703,275.00**

3.18 BEBAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut adalah saldo beban operasional per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
1. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF		
Beban PPAP ABA	-	-
Beban PPAP Kredit Yang Diberikan	916,955,692.00	465,660,791.00
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	**916,955,692.00**	**465,660,791.00**
2. BEBAN PEMASARAN		
Beban Iklan dan Promosi	24,836,500.00	94,888,642.00
Jumlah Beban Pemasaran	**24,836,500.00**	**94,888,642.00**
3. BEBAN ADMINISTRASI UMUM		
a. Beban Tenaga Kerja		
Beban Gaji	2,078,652,443.00	2,338,206,672.00
Beban Honorium	406,307,616.00	387,839,088.00
Beban Tenaga Kerja Lannya	400,000,000.00	-
Jumlah Beban Tenaga Kerja	**2,884,960,059.00**	**2,726,045,760.00**
b. Beban Penelitian dan Pengembangan		
Beban Pendidikan & Pelatihan	71,453,700.00	57,718,200.00
Jumlah Beban Penelitian dan Pengembangan	**71,453,700.00**	**57,718,200.00**
c. Beban Sewa		
Beban Sewa Gedung Kantor	246,375,000.00	216,562,500.00
Beban Sewa Lainnya	11,371,000.00	10,315,675.00
Jumlah Beban Sewa	**257,746,000.00**	**226,878,175.00**

3.18 BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

d. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	55,235,040.00	60,683,733.00
Amortisasi	4,124,985.00	12,554,749.00
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi	**59,360,025.00**	**73,238,482.00**
e. Beban Premi Asuransi		
Premi Asuransi	152,048,837.00	150,542,782.00
Jumlah Beban Tunjangan Kesehatan	**152,048,837.00**	**150,542,782.00**
f Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris Kantor	80,228,900.00	104,995,770.00
Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	**80,228,900.00**	**104,995,770.00**
g. Beban Barang dan Jasa Lainnya		
Beban Barang dan Jasa Lainnya	394,030,679.00	460,023,082.00
Jumlah Beban Barang dan Jasa Lainnya	**394,030,679.00**	**460,023,082.00**
h. Beban Pajak Lainnya		
Beban Pajak Lainnya	40,513,887.00	41,542,800.00
Jumlah Beban Pajak Lainnya	**40,513,887.00**	**41,542,800.00**
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	**3,940,342,087.00**	**3,840,985,051.00**

4. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah tersebut adalah saldo beban operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Administrasi Umum Lainnya	5,497,300.00	6,713,500.00
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**5,497,300.00**	**6,713,500.00**

3.19 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut adalah pendapatan (beban) non non operasional per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
1 PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	9,000,000.00	4,800,000.00
Pendapatan Lain-lain	33,444.00	1,282,622.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**9,033,444.00**	**6,082,622.00**
2 BEBAN NON OPERASIONAL		
Beban Non Operasional	85,507,036.00	61,603,833.00
Jumlah Beban Non Operasional	**85,507,036.00**	**61,603,833.00**
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	**94,540,480.00**	**67,686,455.00**

Biaya Non Operasional Terdiri dari Biaya Sumbangan, Biaya Iuran, Biaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Biaya Non Operasional Lainnya.

3.20 BEBAN TAKSIRAN PAJAK	**55,196,997.00**	**113,781,816.00**

INFORMASI TAMBAHAN

REKENING ADMINISTRATIF

Pendapatan Bunga dalam penyelesaian	3,195,322,735.00	2,488,490,296.00
Aset Produktif yang dihapus buku	183,642,383.00	292,602,495.00
Rekening Administratif Lainnya	272,315,650.00	272,315,650.00
Jumlah Rekening Administratif	**3,651,280,768.00**	**3,053,408,441.00**

JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang berkhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban pada Bank lokal. dan untuk pelaksanaan program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga Independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebankan Premi berkaitan dengan Program penjaminan tersebut sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan simpanan dalam setiap periode yang dibayar 2(dua) kali setahun. Undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU RI No. 7 Th 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No.3 2008 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG

Dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia menerbitkan peraturan No. 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pengenalan "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)".

Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui Identitas Nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib memiliki sistem Informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi mencurigakan dan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "KYC"/Know Your Customer Principles (Prinsip Mengenal Nasabah) berubah menjadi terminologi "CDD"/Customer Due Dilligence.

Lanjutan Informasi Tambahan

Dengan menerapkan program Customer Due Dilligence berarti Bank bertujuan meminimalkan resiko yang mungkin timbul yaitu operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan CDD dan Program APU PPT, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Pemusnahan Massal di Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 8 tahun 2023 tentang APU PPT dan PPPSPM Perubahan Atas POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang APU PPT dan Peraturan OJK no.12/POJK.01/2017 tentang APU PPT.

5. UMUM

1. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) DANA MULTI GUNA yang berkedudukan di Bekasi didirikan berdasarkan akte nomor 50 tanggal 24 Desember 1994 oleh Anis Husin Abdat, SH., di Bekasi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-163.HT.01.01.1995 tanggal 05 Januari 1995.

Akta telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir tercantum pada Akte nomor 3 tanggal 24 April 2024 oleh Notaris Harinanto Sugiono, SH, mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Penambahan Modal Disetor, dan Perubahan Nama Perseroan. Akte perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0118536 tanggal 22 Mei 2024 .

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perseroan adalah berusaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

3. Lokasi Kantor

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. KH. Dewantara No. 63, RT/RW. 001/006, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

4. Legalitas dan Perizinan

Akta Pendirian	: No. 50
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.713.436.2-414.000
Surat Izin Usaha BPR	: KEP-106/KM.17/1996
Nomor Induk Berusaha	: 9120107700048
Surat Domisili	: 503/037/V/2022-Kesra-

5. Kepengurusan

Susunan Pengurus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Riwandari Juniasti
Komisaris	: Bambang Widiyanto

Dewan Direksi :

Direktur Utama	: Muhamad Alwin
Direktur	: Darheni Cahya Noviyanti

6. Modal Perusahaan

Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (Sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 6.200.000.000,- (Enam miliar dua ratus juta rupiah) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

5. UMUM (Lanjutan)

6. Modal Perusahaan

Kepemilikan Saham Tahun 2024 :

Pemegang Saham	Lembar Saham	Prosentase	Jumlah (Rp)
Ny. Riwandari Juniasti	4.185	67,50%	4.185.000.000
Nn. Darheni Cahya N	1.240	20,00%	1.240.000.000
Tn. Drs. H. Soenarko	775	12,50%	775.000.000
JUMLAH	**5.000**	**100,00%**	**6.200.000.000**

7. Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan pada PT. BPR DANA MULTI GUNA per 31 Desember 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, termasuk 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Dewan Komisaris.

8. Komitmen Dan Perjanjian Penting

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan perjanjian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

9. Peristiwa Kemudian

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak terdapat peristiwa setelah tanggal Neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

10. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada 10 Maret 2025

TINGKAT KESEHATAN BANK
PT. BPR DANA MULTI GUNA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

LAMPIRAN I

Kriteria Tingkat Kesehatan			Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
I. PERMODALAN						
	CAR =	Jumlah Modal	6,930,579,208	**51.52%**	6,535,553,679	**49.81%**
		A T M R	13,451,779,636		13,121,648,110	
	Persentasi ATMR Tahun 2024 dan 2023 yaitu 49,81% dan 51,52%. Persentasi tersebut > 12 % maka dinyatakan sehat.					
II. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF						
	KAP =	Aset Produktif yg diklasifikasikan	5,196,627,057	**17.34%**	3,957,155,947	**12.92%**
		Jumlah Aset Produktif	29,970,706,089		30,625,381,273	
	Persentasi KAP Tahun 2024 dan 2023 yaitu 17.34% dan 12.92%. KAP Tahun 2024 dinyatakan tidak sehat dengan ambang batas > 14.85%. KAP Tahun 2023 dinyatakan cukup sehat dengan ambang batas >10,35% s.d 12,60%					
III. EARNING / RENTABILITAS						
	ROA =	Laba / Rugi Berjalan	370,433,872	**1.17%**	589,927,178	**1.95%**
		Total Aset	31,696,463,628		30,175,678,377	
	Persentasi ROA Tahun 2024 dan 2023 yaitu 1,17% dan 1.95%. Persentase pada tahun 2024 tersebut >= 0,999% s.d 1,215% maka dinyatakan cukup sehat, dan Persentase tahun 2023 tersebut >= 1,215% maka dinyatakan sehat.					
	BOPO =	Beban Operasional	6,377,022,381	**93.45%**	5,797,951,259	**89.98%**
		Pendapatan Operasional	6,823,929,845		6,443,399,648	
	Persentasi BOPO Tahun 2024 dan 2023 yaitu 93.45% dan 89.98%. Persentase pada tahun 2024 tersebut >=93.52% sd < 94.72% maka dinyatakan cukup sehat sedangkan persentase pada tahun 2023 tersebut <= 93,25% maka dinyatakan sehat.					
	NIM =	Pendapatan Bunga Bersih	4,177,984,434	**13.41%**	4,303,068,571	**14.50%**
		Aset Produktif	31,155,698,807		29,668,593,373	
	ROE =	Laba Setelah Pajak	370,433,872	**5.34%**	589,927,178	**9.03%**
		Rata-rata Modal Inti	6,930,579,208		6,535,553,679	
	Persentasi NIM Tahun 2024 dan 2023 yaitu 13.41% dan 14.50% , dan Persentase ROE Tahun 2024 dan 2023 yaitu 5.34% dan 9.03%. Faktor Rentabilitas memiliki peringkat <1 atau memadai.					
IV. LIKUIDITAS / LIQUIDITY						
	Cash Rasio =	Alat Liquid	2,277,026,691	**11.97%**	2,351,224,963	**12.21%**
		Utang Lancar	19,017,858,692		19,256,962,672	
	LDR =	Kredit yang diberikan	21,300,354,798	**112.63%**	22,854,713,210	**119.42%**
		Dana yang diterima	18,911,553,432		19,138,017,519	
	Persentasi Cash Rasio Tahun 2024 dan 2023 yaitu 11.97% dan 12.21% , dan LDR Tahun 2024 dan 2023 yaitu 112.63% persentase dinyatakan sehat dan 119.42% persentase tersebut dinyatakan sehat					
V. NPL						
	NPL GROSS =	KOL KL, D, M	5,558,179,106	**26.09%**	4,253,314,736	**18.61%**
		Kredit yang diberikan	21,300,354,798		22,854,713,210	
	NPL NETTO=	KOL KL, D, M - PPAP	4,806,031,269	**22.56%**	3,828,479,281	**16.75%**
		Kredit yang diberikan	21,300,354,798		22,854,713,210	

Catatan di NPL terdapat dalam Management Letter

PT BPR DANA MULTI GUNA
PERHITUNGAN ATMR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN II

KETERANGAN	2024 Jumlah	%	2023 Jumlah
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)			
1. AKTIVA NERACA			
1.1. Kas	46,675,400	0%	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0%	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat RI, Tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antar BPR dan nasabah disertai surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai sebesar berdasarkan perjanjian antar BPR dan nasabah disertai surat kuasa pencairan nilai terendah antara agunan dan baki debet.	-	0%	-
1.4 Agunan yang diambil alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
1.5 Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	-	15%	-
1.6 Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito,Tabungan serta Tagihan Lainnya Kepada Bank Lain	8,670,351,292	20%	1,734,070,258
1.7 Kredit Kepada Bank Lain atau Pemerintah Daerah	-	20%	-
1.8 Kredit Yang di Jamin Oleh Bank Lain atau Pemerintah Daerah	-	20%	-
1.9 Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	12,589,472,995	30%	3,776,841,899
1.10 Kredit Kepada BUMN/BUMD	-	50%	-
1.11 Bagian Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).	-	50%	-
1.12 Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	-	50%	-
1.13 Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	3,226,858,025	50%	1,613,429,013
1.14 Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	421,450,427	70%	295,015,299
1.15 Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	70%	-
1.16 Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas	602,782,917	100%	602,782,917
1.17 Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	-	100%	-
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	1,569,410,601	100%	1,569,410,601
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	2,125,737,864	100%	2,125,737,864
1.18 Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	218,491,160	100%	218,491,160
1.19 AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	100%	-
1.20 Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19	1,516,000,626	100%	1,516,000,626
JUMLAH ATMR	**30,987,231,307**		**13,451,779,636**

PT BPR DANA MULTI GUNA
PERHITUNGAN ATMR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN II

KETERANGAN	2023			2023
	Jumlah	PPAP Khusus	%	Jumlah
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)				
1. AKTIVA NERACA				
1.1. Kas	120,556,900		0%	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-		0%	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat RI, Tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antar BPR dan nasabah disertai surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai sebesar berdasarkan perjanjian antar BPR dan nasabah disertai surat kuasa pencairan nilai terendah antara agunan dan baki debet.	-		0%	-
1.4 Agunan yang diambil alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-		0%	-
1.5 Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	-		15%	-
1.6 Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito,Tabungan serta Tagihan Lainnya Kepada Bank Lain	7,770,668,063		20%	1,554,133,613
1.7 Kredit Kepada Bank Lain atau Pemerintah Daerah	-		20%	-
1.8 Kredit Yang di Jamin Oleh Bank Lain atau Pemerintah Daerah	-		20%	-
1.9 Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	12,726,416,495	2,036,402	30%	3,817,314,028
1.10 Kredit Kepada BUMN/BUMD	-		50%	-
1.11 Bagian Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).	-		50%	-
1.12 Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	-		50%	-
1.13 Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	5,519,837,044	1,532,596	50%	2,759,152,224
1.14 Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	450,000,000	10,530,000	70%	307,629,000
1.15 Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	70%	-
1.16 Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas	649,430,568	812,500	100%	648,618,068
1.17 Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	-		100%	-
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	1,708,206,884	318,054,972	100%	1,390,151,912
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	1,800,822,219	105,373,537	100%	1,695,448,682
1.18 Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	249,846,585		100%	249,846,585
1.19 AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-		100%	-
1.20 Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19	699,353,998		100%	699,353,998
JUMLAH ATMR	**31,695,138,756**	**438,340,007**		**13,121,648,110**

BPR DANA MULTI GUNA
PERMODALAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN IV

KETERANGAN	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
	Jumlah Setiap Komponen	Jumlah	Jumlah Setiap Komponen	Jumlah
I. MODAL				
1. Modal Inti				
1.1. Modal Disetor	6,200,000,000	6,200,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
1.2. Modal Pinjaman / Sumbangan	-	-	-	-
1.3. Dana Setoran Modal	-	-	-	-
1.4. Cadangan Tujuan	420,000,000	420,000,000	410,000,000	410,000,000
1.5. Cadangan Umum	98,891,966	98,891,966	98,891,966	98,891,966
1.6. Laba Ditahan	-	-	-	-
1.7. Laba Tahun - Tahun Lalu	8,367,222	8,367,222	712,000,179	712,000,179
1.8. Rugi Tahun - Tahun Lalu				
1.9. Laba Tahun Berjalan (50 % Setelah THP)	315,236,875	157,618,438	506,367,043	253,183,522
0 Rugi Tahun Berjalan				
Sub Total	**7,042,496,063**		**6,727,259,188**	
1.10. Goodwill (AYDA JT)				
1.11. Kekurangan PPAP				
Jumlah Modal Inti		**6,884,877,626**		**6,474,075,667**
2. Modal Pelengkap				
2.1. Cadangan Revaluasi aktiva tetap	-	-	-	-
2.2. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (Maksimum 1.25 % dari ATMR)	13,451,779,636	45,701,582	13,121,648,110	61,478,012
2.3. Modal Kuasi / Modal Pinjaman				
2.4. Pinjaman Sub Ordinasi (Maksimum 50 % dari Modal Inti)				
Jumlah Modal Pelengkap	**13,451,779,636**		**13,121,648,110**	
Jumlah Modal Pelengkap Yang Dihitungkan (Maksimum 100 % dari Modal Inti)		**45,701,582**		**61,478,012**
3. Jumlah Modal		6,930,579,208		6,535,553,679
II. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)		1,614,213,556		1,574,597,773
III. KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL		5,316,365,651		4,960,955,905
IV. RASIO MODAL $\frac{\text{Jumlah Moc}}{\text{ATMR}}$ X 100%		**51.52%**		**49.81%**
V. RASIO MIAPB (Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah)		**144.46%**		**169.10%**

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NANO SUYATNA,S.E.,AK.,GPA.
Audit, Tax, Accounting and Management Solutions
Surat Ijin Usaha Kep.Menkeu RI No. 552/KM.1/2017 dan Ijin OJK STTD.KAP-79/PM.2/2018

MANAGEMENT LETTER

PT BPR DANA MULTI GUNA

2024

Telah dilakukan pembahasan pada hari ini Hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 dengan catatan/tanpa catatan.

PT BPR Dana Multi Guna

1.

(Muhamad Alwin)

2.

(Darheni Cahya Novianti)

KAP Nano Suyatna, SE., Ak., CPA.

1.

(Nano Suyatna, SE., Ak., ME., CPA)

2.

(Siti Mialasmaya,SE.,MM.,Ak., CA.,CIAP)

3.

(Amalia Astuti, SE)

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NANO SUYATNA,S.E.,AK.,CPA.
Audit, Tax, Accounting and Management Solutions
Surat Ijin Usaha Kep.Men.Keu RI No: 552/KM.1/2017 dan Ijin OJK STTD.KAP-179/PM.2/2018

Nomor : 008/PAL-ML/KAPNS/III/2025
Lampiran : -
Hal : *Management Letter* atas Audit Laporan Keuangan
PT. BPR DANA MULTI GUNA

Kepada Yth.
Direksi dan Komisaris
PT. BPR DANA MULTIGUNA
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 63, Cikarang Utara.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya pemeriksaan general audit **PT. BPR DANA MULTIGUNA** untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, bersama *management letter* ini kami sampaikan beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dan tindak lanjut Direksi, Dewan Pengawas, dan Management.

Management letter ini dimaksudkan untuk memberikan, informasi yang digunakan oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Management serta pihak lain dalam organisasi dan tidak disajikan kepada pihak diluar organisasi guna menghindari kesalahpahaman penyajian management letter dan salah pengertian atas keterbatasan evaluasi suatu stuktur pengendalian intern.

Hal-hal yang akan kami ungkapkan adalah telaah mendasar atas struktur pengendalian intern, pengujian kewajaran penyajian laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku yang merupakan tanggung jawab Manajemen.

Dari pemahaman tersebut, kami temukan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan: SAK ETAP, Pedoman Akuntansi BPR, Aturan tentang BPR dari Bank Indonesia dan Pedoman Operasional serta Kebijakan yang telah dibuat oleh manajemen. Kondisi tersebut diharapkan bisa segera diperbaiki, sehingga tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penyajian laporan keuangan **PT. BPR DANA MULTIGUNA** yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Net Performance Loan (NPL)**
   Berdasarkan hasil perhitungan Rasio NPL (*Non Performing Loan*) Gross dan Neto BPR dengan perhitungan sbb :
   - Kurang Lancar : 288.995.184
     Diragukan : 868.217.828
     Macet : 4.400.966.094
     Jumlah Kol. : 5.558.179.106
     PPAP : (752.147.837)
     Jumlah : 4.806.031.269

   - **Jumlah Kredit yang diberikan : Rp. 21.300.354.798,-**

NPL Gross : $\frac{5.558.179.106}{21.300.354.798}$ = **26.09%**

NPL Neto : $\frac{4.806.031.269}{21.300.354.798}$ = **22.56%**

Office : Griya Bandung Asri 2 Blok F5 No.20-21 Bandung 40287 E-mail : kapns @ yahoo.com Web: https://kapns.com 08112244282

Prosentase tersebut dinilai melebihi batas yang telah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu sebesar 5% NPL Netto.
Terdapat kenaikan Prosentase NPL Netto dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5.81 %. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari Manajemen agar tetap meningkatkan upaya melakukan penagihan serta melakukan strategi-strategi dinamis untuk menurunkan prosentase NPL.

Tanggapan Manajemen :

NPL pada bulan Desember 2024 sebesar 26,09% (NPL Gross) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2023 sebesar 18,61% (NPL Gross). Manajemen akan terus melakukan perbaikan kualitas kredit dengan :

a) Meningkatkan intensitas penagihan untuk dapat menurunkan prosentase NPL.
b) Meningkatkan kompetensi dalam proses pemberian kredit, khususnya terkait analisis kemampuan membayar debitur, penilaian agunan lebih konservatif sehingga ketika agunan akan dijual tidak menimbulkan kerugian dan proses *Restructuring* yang lebih selektif .

2. Kredit Yang Diberikan

Kondisi

Berdasarkan hasil sampling yang dilakukan, nasabah existing yang melakukan restrukturisasi kredit perlu memperbaharui dokumen-dokumen seperti legalitas serta Laporan keuangan terutama dengan jenis kredit Modal Kerja. Nasabah tersebut yaitu :

1. Murniati dengan jumlah plafond Rp 450.000.000,-
2. Entan Hartaningrum dengan jumlah plafond Rp. 250.000.000,-

Segala informasi yang berkaitan dengan debitur tentunya akan mempengaruhi analisa kredit, maka dari itu manajemen perlu melengkapi dokumen-dokumen terkait informasi debitur, mengupdate dokumen-dokumen debitur sesuai Perundang-Undangan yang berlaku kemudian mengarsip dokumen-dokumen tersebut dengan baik dan tertib, serta tetap mengimplementasikan Prinsip Kehati-hatian.

Tanggapan Manajemen :

Akan menjadi perhatian manajemen terkait administrasi kredit terhadap kelengkapan, pengkinian dan pengarsipan dokumen-dokumen debitur dengan baik dan tertib, serta tetap mengimplementasikan Prinsip Kehati-hatian.

a) Murniati - Laporan keuangan sudah dilakukan pembaharuan beserta PO (purchase order) dan rekening koran. Legalitas usaha akan segera dilakukan pengkinian.
b) Drg Entan - Legalitas Praktik Dokter sudah diperbaharui dan registrasi pasien setiap bulan sudah dilakukan. Rekening koran akan segera dilakukan pengkinian.

3. Update Software System Sebagai Persiapan Penerapan CKPN

Penerapan Sistem CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penerapan ini berlaku sejak 1 Januari 2025. Untuk menerapkan CKPN, BPR dapat menggunakan Sistem Informasi Perhitungan Cadangan (SIP-CKPN). Aplikasi ini dapat membantu BPR dalam melakukan simulasi perhitungan CKPN dengan berbagai metode.

Office : Griya Bandung Asri 2 Blok F5 No.20-21 Bandung 40287 E-mail : kapns @ yahoo.com Web: https://kapns.com 08112244282

Dalam menerapkan CKPN, BPR perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

a. Memilih metode CKPN yang sesuai dengan regulasi OJK
b. Memastikan integrasi antara metode CKPN dengan sistem pelaporan yang ada di CBS (*Core Banking System*)
c. Memastikan perhitungan CKPN berjalan secara otomatis, akurat, dan sesuai standar akuntansi

Tanggapan Manajemen :

Sesuai SE OJK Nomor 21/SEOJK.03/2024, yang ditetapkan tanggal 24 Desember 2024, dan diberlakukan mulai 01 Januari 2025, tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Kami telah melakuan perhitungan CKPN dengan menggunakan *Peer Grup Data* yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan surat nomor: SR-12/KO.11/2025 Tanggal 04 Februari 2025. Secara prinsip dan fundamental CBS (Core Banking System) kami sudah mendukung pembentukan CKPN sesuai ketentuan SAK-EP, meskipun masih terus dilakukan pengkajian dan penyesuaian.

Demikian surat komentar (*management letter*) ini ditujukan untuk memberi informasi kepada Pimpinan, Dewan Komisaris dan manajemen, serta bukan untuk disajikan kepada pihak-pihak luar BPR guna mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu evaluasi dan test yang kami lakukan atas pengendalian intern dan standar pemeriksaan yang kami gunakan.

Kantor Akuntan Publik
Nano Suyatna, SE.,Ak.,CPA.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK NANO SUYATNA,SE.,AK.,CPA

Nano Suyatna., SE., Ak.,ME.,M.Kom.,CPA

No. Izin AP : 1331

No. Izin UKAP : Kep-552/KM.1/2017

Bandung, 10 Maret 2025

Office : Griya Bandung Asri 2 Blok F5 No.20-21 Bandung 40287 E-mail : kapns @ yahoo.com Web: https://kapns.com 08112244282

BPR DMG
simpel.fleksibel

GRAHA MULTI GUNA Jl. Ki Hajar Dewantara No.63 Cikarang Utara, Bekasi 17534
www.bprdmg.com
customer-service@bankdmg.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR. Dana Multi Guna

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR Dana Multi Guna menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Nano Suyatna, SE., Ak.,CPA. dari Kantor Akuntan Publik Nano Suyatna, SE., Ak.,CPA. Rekan.
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2024 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Kabupaten Bekasi, 24 April 2025

PT. BPR Dana Multi Guna

BPR DMG

Muhamad Alwin	Darheni Cahya Noviyant
Direktur Utama	Direktur

In-House Training APU PPT dan PPPSPM
Serta Sosialiasi POJK Terbaru